

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Sijunjung.

Kabupaten Sijunjung terletak di sebelah selatan Propinsi Sumatera Barat memiliki luas daerah $\pm 3.130,80 \text{ m}^2$, dan secara geografis terletak pada posisi geografis $0^{\circ} 18' 43'' \text{ LS} -1^{\circ} 41' 46'' \text{ LS}$ dan $101^{\circ} 30' 52'' \text{ BT} -100^{\circ} 37' 40'' \text{ BT}^1$. Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Propinsi Jambi. Mengingat letaknya di persimpangan jalur tersebut, Sijunjung merupakan jalur ekonomi dan jalur pariwisata.

Secara wilayah administrasi luas wilayah Kabupaten Sijunjung telah mengalami tiga kali perubahan sejak terbentuk pada tanggal 18 Februari 1949 melalui Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Barat No.: SK/9/GN/IST dan diperkuat oleh UU No.12 Tahun 1956. Perubahan terakhir terjadi ketika dilakukannya pembentukan Kabupaten Dharmasraya melalui UU No. 38 Tahun 2003 dimana wilayahnya merupakan 49 persen dari wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sehingga luas wilayahnya sekarang menjadi 313.080 ha. Luas tersebut setara dengan 7,40% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kabupaten nomor dua terkecil di Provinsi Sumatra Barat. Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung dengan luas 313.080 Ha meliputi 8 Kecamatan, 61 Nagari dan 1 desa dengan 263 Jorong.

Pada tanggal 28 Maret 2008 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung telah diubah namanya menjadi Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008.

Secara administrasi wilayah kabupaten Sijunjung berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Prop Riau

Periode 2010 – 2015 adalah periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung 2006 – 2025. Pada periode pertama telah diletakan dasar-dasar pembangunan untuk menuju cita-cita pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD dimaksud. Berangkat dari hasil capaian kinerja pembangunan periode 2006 – 2010, untuk kesinambungan pembangunan dan terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), maka dalam pelaksanaan RPJPD tahap kedua pemerintah Kabupaten Sijunjung telah menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sijunjung tahun 2010 – 2015.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki 35 (tiga puluh lima) SKPD yang terdiri dari tiga belas dinas, enam badan, lima kantor, delapan kecamatan dan dua sekretariat daerah, seperti yang tergambar di dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Daftar Nama SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung

No.	SKPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum
5	Bappeda
6	Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
7	Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
12	Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga
13	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
14	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
15	Sekretariat Daerah
16	Sekretariat DPRD
17	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
18	Inspektorat Kota
19	Kecamatan Kamang Baru
20	Kecamatan Tanjung Gadang
21	Kecamatan Lubuk Tarok
22	Kecamatan Sijunjung
23	Kecamatan IV Nagari
24	Kecamatan Koto VII
25	Kecamatan Sumpur Kudus
26	Kecamatan Kupitan
27	Badan Kepegawaian Daerah
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29	BP4KKP
30	BPMPN
31	Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
32	Distapangbun
33	Dinas Kehutanan
34	Dinas Pertambangan Energi
35	Dinas Peternakan dan Perikanan

Sumber: LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

4.2. Hasil Penelitian

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung sesuai amanah Permendagri No. 64 Tahun 2013, telah melakukan persiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual yang salah satu upayanya adalah melakukan pengembangan aplikasi SIPKD sesuai Standar Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual yang di implementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2015.

Implementasi SIPKD berbasis akrual sesuai Permendagri No. 64 tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban atau pelaporan keuangan daerah, untuk mengetahui apakah SIPKD bisa membantu pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, maka peneliti melakukan penelitian terhadap SIPKD basis akrual dengan indikator

penelitian akurasi aplikasi, relevansi aplikasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.

Penelitian dilakukan dengan metode kuisisioner dan observasi fokus pada modul penatausahaan, modul pertanggungjawaban dan modul pelaporan untuk SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) serta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penelitian dilaksanakan dengan lokasi penelitian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai entitas SKPKD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) sebagai entitas SKPD dengan subjek penelitian admin SIPKD, PPK SKPD, Kabid Pendapatan SKPKD, Kabid Perbendaharaan SKPKD dan Kabid Akuntansi SKPKD untuk sumber data kuisisioner. Pengambilan lokasi penelitian tersebut adalah SKPD – SKPD tersebut mempunyai transaksi beragam baik pendapatan maupun belanja yang akan sangat kompleks dalam pengelolaan keuangan basis akrual, selain itu DPKD juga mempunyai fungsi sebagai SKPKD yang akan menjadi konsolidator pertanggungjawaban keuangan daerah yang hasil akhirnya adalah LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Dalam pelaksanaan observasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual dilakukan dengan cara pengujian aplikasi SIPKD yang dinilai berdasarkan keakuratan, relevan dan ketepatan waktu, selanjutnya dihitung persentasenya sehingga akan menghasilkan indeks yang menunjukkan keefektifan penerapan SIPKD dalam kriteria-kriteria pelaksanaan Sistem Akuntansi

Pemerintah berbasis akrual. Semakin tinggi nilai indeks, berarti penerapan SIPKD dalam SAPD berbasis akrual tersebut semakin efektif.

4.2.1. Penerapan SIPKD pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Sijunjung.

Penelitian tentang penerapan SIPKD pada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual Kabupaten Sijunjung peneliti telah menentukan beberapa indikator sebagai alat uji yang masing – masing indikator mempunyai kriteria sebagai alat uji dalam kuisisioner yang di sampaikan kepada subjek penelitian, adapun indikator tersebut adalah akurat, relevan dan ketepatan waktu.

4.2.1.1. Pengujian Akurasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah berbasis akrual kabupaten Sijunjung.

Uji keakuratan yang dipakai dalam Penelitian SIPKD adalah alur aplikasi, identifikasi transaksi, hasil aplikasi dengan menggunakan form kuisisioner yang telah disiapkan dengan kriteria – kriteria yang sesuai dengan tabel uji. Form kuisisioner disampaikan kepada partisipan penelitian yaitu admin SIPKD, dan pejabat yang berwenang membidangi proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan implementasi aplikasi SIPKD, adapun pejabat tersebut adalah Kabid Pendapatan, Kabid Perbendaharaan, Kabid Akuntansi, dan PPK SKPD. Dalam menentukan kriteria pengujian yang digunakan dalam form kuisisioner peneliti menitik beratkan kepada ada atau tidaknya format dokumen, kualitas isi dokumen sesuai yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri N0.64 tahun 2013, sebagai pembanding dari hasil form kuisisioner tersebut peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD

dengan menguji menu – menu dalam aplikasi SIPKD serta tahapan proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dalam aplikasi SIPKD sesuai kriteria dalam form kuisisioner.

4.2.1.1.1. Pengujian Alur Aplikasi

Dalam melaksanakan pengujian alur aplikasi, indikator yang menjadi ukuran penilaian adalah ada tidaknya format dokumen pendukung proses pengelolaan transaksi sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) basis akrual dan hasil laporan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) basis akrual. Pengujian alur aplikasi ini menggunakan 49 kriteria tabel uji yang dituangkan dalam form kuisisioner. Secara garis besar pengujian alur aplikasi ini menguji kelengkapan dokumen serta penyajian informasi pada proses penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pengujian alur aplikasi mengelompokkan kriteria pengujian sebagai berikut :

- a. Pengujian alur penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah metode *Official Assesment*.
- b. Pengujian alur penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah metode *Self Assesment*.
- c. Pengujian alur penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan diterima dimuka.
- d. Pengujian alur penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah transfer.
- e. Pengujian alur penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja LS.

- f. Pengujian alur penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja UP/GU/TU.
- g. Pengujian alur penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kriteria pengujian diatas dengan melihat pengaruh proses dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, sehingga dapat ditentukan apakah aplikasi SIPKD dapat mengakomodir alur proses pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual sesuai Permendagri No. 64 tahun 2013.

4.2.1.1.1.1. Pengujian Alur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Official Assesment*.

Pendapatan *Official Assesment* adalah pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan metode penetapan besaran pajak atau retribusi terhadap objek pajak yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan dengan metode *Official Assesment* contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , retribusi terminal. Pengujian alur aplikasi untuk pengelola pendapatan dengan metode *Official Assesment* dilaksanakan dengan memberikan kriteria tentang tersedianya fitur dalam aplikasi SIPKD, pengujian dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) sebagai SKPKD untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah seperti misalnya Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, selain pengujian dilaksanakan di DPKD, penelitian juga dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD pendapatan *Official Assesment* yang dikelola adalah penerbitan Surat Ketetapan Retribusi terminal. adapun fitur yang akan dijadikan kriteria penguji adalah :

- a. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan form dasar perhitungan pajak dan retribusi.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan dokumen perhitungan pajak dan retribusi.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan jurnal akuntansi penerimaan *Official Assesment*.
- d. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan buku besar dan buku besar pembantu penerimaan.
- e. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan register penerimaan.
- f. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan piutang penerimaan.

Hasil dari kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Hasil Pengujian alur Pendapatan *Official Assesment* SKPKD

Kriteria	Form Dasar Perhitungan Pajak	Menerbitkan Dokumen Perhitungan Pajak (SKP)	Laporan Jurnal Akuntansi Penerimaan <i>Official Assesment</i>	Buku Besar/ Buku Besar Pembantu Penerimaan	Lap. Register Penerimaan	Lap. Piutang Penerimaan	Total Nilai
Admin SIPKD	0	0	1	1	1	0	3
Kepala Bidang Pendapatan DPKD	0	0	1	1	1	0	3
Kepala Bidang Akuntansi DPKD	0	0	1	1	1	0	3
Total Nilai							9
Nilai Maks							18
Persentase keakuratan alur aplikasi							50.00%

Sumber : Pengolahan data

Tabel. 4.3
Hasil Pengujian alur Pendapatan *Official Assesment* SKPD

Kriteria	Form Dasar Perhitungan Retribusi	Menerbitkan Dokumen Perhitungan Retribusi (SKR)	Laporan Jurnal Akuntansi Penerimaan <i>Official Assesment</i>	Buku Besar/ Buku Besar Pembantu Penerimaan	Lap. Register Penerimaan	Lap. Piutang Penerimaan	Total Nilai
Admin SIPKD	0	0	1	1	1	0	3
PPK SKPD	0	0	1	1	1	0	3
TOTAL NILAI							6
Nilai Maks							12
Persentase keakuratan alur aplikasi							50.00%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisioner yang sudah diisi oleh subjek penelitian diperoleh hasil bahwa SIPKD hanya menyediakan fasilitas pemasukan data penerimaan *Official Assesment* tanpa mengakomodir proses perhitungan pajak atau retribusi, total nilai dari hasil olah data kuisioner pengelolaan pendapatan metode *Official Assesment* menggunakan aplikasi SIPKD dari total nilai 30 adalah 15 dengan persentase nilai uji alur *official assessment* 50 %. Sesuai keterangan dari partisipan yang menjadi subyek penelitian yang disampaikan dalam form kuisioner bahwa aplikasi SIPKD yang di implementasikan pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam kuisioner mempunyai kendala teknis yang dominan terhadap pengelolaan pendapatan *Official Assesment* antara lain sebagai berikut :

- a. Bidang Pendapatan DPKD Kabupaten Sijunjung dalam mengelola pendapatan *Official Assesment* mempunyai alat bantu aplikasi khusus, seperti misalnya aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan dimana aplikasi ini membantu dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari pendataan sampai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah yaitu SPPT PBB dan aplikasi PBB ini

juga menyediakan fasilitas pelayanan pembayaran yang terkoneksi langsung dengan Bank Nagari sebagai perwujudan Kas Daerah Pemda. Secara prosedural hal yang menjadi kendala dalam implementasi SIPKD *Official Assesment* adalah belum adanya fasilitas integrasi horizontal yang menjembatani antara aplikasi PBB dengan SIPKD, sehingga untuk memenuhi prosedur akrual basis SPPT PBB yang terbit dari aplikasi PBB sebagai hasil penetapan pajak sebanyak 90.000 objek pajak harus di input ulang ke dalam aplikasi SIPKD hal ini tentunya akan sangat tidak efisien dalam hal sumber daya manusia maupun waktu dan biaya yang di butuhkan.

- b. Kabid Pendapatan juga menyatakan dalam catatan tersebut bahwa SIPKD masih mengakomodir tahapan proses manual pengelolaan keuangan sehingga menciptakan duplikasi proses dalam satu transaksi yang menyebabkan penyelesaian transaksi memerlukan waktu lebih lama, ketika dicoba untuk mengikuti alur *Official Assesment* dalam aplikasi SIPKD untuk memenuhi SOP akrual basis, maka banyak terjadi duplikasi pekerjaan untuk satu transaksi pengelolaan pendapatan *Official Assesment*, seperti misalnya proses dalam satu alur aplikasi pendapatan *Official Assesment* adalah melalui menu pengajuan penetapan, persetujuan penetapan dan kemudian ketika akan melakukan penyetoran harus input pengajuan kemudian persetujuan dan harus mendapatkan validasi pengesahan pada menu pertanggungjawaban sebelum transaksi ini dinyatakan sebagai pendapatan.
- c. Kabid Akuntansi DPKD terkait hasil jurnal akuntansi menyampaikan bahwa SIPKD masih sangat tergantung dengan jurnal manual yang di tampung

dalam sebuah fasilitas yaitu mapping rekening, dalam fasilitas mapping rekening ini user diminta untuk memetakan antara rekening APBD dengan rekening Bagan Akun Standar sehingga di perlukan user yang benar – benar paham dengan perlakuan akuntansi tersebut dan apabila terjadi kesalahan dalam memetakan rekening tersebut maka akan terjadi kesalahan yang fatal dalam mengakomodir proses akuntansi. Seharusnya aplikasi besar seperti SIPKD ini sudah menyediakan fasilitas jurnal otomatis yang diatur oleh aplikasi sesuai panduan dari Permendagri 64 tahun 2013 yang merupakan penerapan dari PP 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual. Masih menurut Kabid akuntansi, SIPKD dalam penyediaan jurnal akuntansi dan laporan–laporan terkait pengelolaan pendapatan *official assessment*, sebagian besar sudah tersedia namun masih belum berjalan sesuai fungsinya, dan masing – masing fungsi tersebut belum berjalan sesuai prosedur yang ada misalnya ketika ditransaksikan pengesahan penetapan jurnal piutang dapat dihasilkan, tetapi ketika ada pembayaran pajak yang sudah di tetapkan tersebut jurnalnya masih kurang sesuai dan piutang tidak berkurang. Hasil diskusi dengan pihak pengembang SIPKD di dapatkan solusi untuk membuat jurnal manual difasilitas penerbitan bukti memorial untuk jurnal khusus yang setelah dicoba juga hasilnya tidak sesuai. Kabid Akuntansi juga menyampaikan kendala yang sama dengan Kabid Pendapatan bahwa masih banyak terjadi duplikasi proses dalam pengelolaan transaksi pendapatan *Official Assesment* yang memperlambat proses pengelolaan pendapatan *Official Assesment*.

Setelah dilakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD bahwa data yang bisa diterima oleh SIPKD hanya nomor, tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, nominal pajak atau retribusi, identitas objek pajak dan keterangan, sedangkan proses perhitungan ketetapan pajak atau retribusi dan penerbitan dokumen SKP atau SKR menggunakan aplikasi selain SIPKD. Data yang telah di masukkan pada modul penerimaan dengan penetapan akan dilakukan jurnal otomatis dan terdapat fasilitas laporan jurnal pendapatan, laporan buku besar penerimaan atau buku besar pembantu serta laporan register penerimaan sedangkan untuk laporan piutang penerimaan tidak disediakan fasilitasnya oleh SIPKD.

4.2.1.1.1.2. Pengujian Alur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Self Assesment*.

Pendapatan *Self Assesment* adalah pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan metode penerimaan tanpa penetapan besaran pajak atau retribusi terhadap objek pajak melainkan perhitungan besaran pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri sesuai omset yang diakui oleh wajib pajak. Pendapatan dengan metode *Self Assesment* adalah Pajak Hotel , Pajak Rumah Makan. Pengujian alur aplikasi untuk pengelola pendapatan dengan metode *Self Assesment* dilaksanakan dengan memberikan kriteria tentang tersedianya fitur dalam aplikasi SIPKD, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya form inputan penerimaan *self assesment*.
- b. Ada atau tidaknya laporan jurnal penerimaan *self assesment*.

- c. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan buku besar dan buku besar pembantu penerimaan *self assesment*.
- d. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan register penerimaan.

Hasil dari kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel. 4.4
Hasil Pengujian alur *self assesment* SKPKD

Keterangan	Form Inputan Penerimaan	Laporan Jurnal Akuntansi Penerimaan <i>Self Assesment</i>	Buku Besar/Buku Besar Pembantu Penerimaan	Laporan Register Penerimaan	Total Nilai
Admin SIPKD	1	1	1	1	4
Kabid Pendapatan DPKD	1	1	1	1	4
Bidang Akuntansi DPKD	1	1	1	1	4
Total Nilai					12
Nilai Maks					12
Persentase alur aplikasi					100.00%

Sumber : Pengolahan data

Tabel.4.5
Hasil Pengujian alur *self assessment* SKPD

Keterangan	Form Inputan Penerimaan	Laporan Jurnal Akuntansi Penerimaan <i>Self Assesment</i>	Buku Besar/Buku Besar Pembantu Penerimaan	Laporan Register Penerimaan	Total nilai
Admin SIPKD A	1	1	1	1	4
Admin SIPKD B	1	1	1	1	4
PPK-SKPD A	1	1	1	1	4
PPK-SKPD SKPD B	1	1	1	1	4
Total Nilai					16
Nilai Maks					16
Persentase alur aplikasi					100.00%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas pemasukan data penerimaan *Self Assesment* dan disediakan fasilitas untuk penerbitan laporan jurnal akuntansi, buku besar atau buku besar pembantu penerimaan, laporan register penerimaan, nilai dari hasil olah data kuisioner adalah 12 dengan persentase nilai uji alur *self assessment* 100 %.

Keterangan yang disampaikan oleh partisipan dalam hal ini subyek penelitian mengenai penggunaan fasilitas pengelolaan pendapatan *self assessment* yang disampaikan oleh Kabid Pendapatan, Kabid Akuntansi, PPK SKPD adalah masih banyaknya duplikasi proses dalam menu-menu aplikasi sehingga memperlambat waktu proses dalam satu transaksi.

Setelah dilakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD fasilitas untuk mengelola penerimaan *Self Assesment* beserta laporan yang dijadikan kriteria pengujian dapat di sampaikan bahwa SIPKD menyediakan fasilitas pengelolaan pendapatan *Self Assesment*.

4.2.1.1.1.3. Pengujian Alur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan Diterima Dimuka.

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan metode penerimaan yang disetor sebagian dari total ketetapan pajak atau retribusi yang seharusnya dibayarkan dalam masa pajak atau retribusi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Pendapatan dengan metode pendapatan diterima dimuka adalah pembayaran

cicilan retribusi pasar grosir yang masa ketetapan retribusinya satu tahun, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya form inputan penerimaan diterima dimuka.
- b. Ada atau tidaknya laporan jurnal penerimaan diterima dimuka.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan buku besar dan buku besar pembantu penerimaan diterima dimuka.
- d. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan register penerimaan.

Tabel.4.6
Hasil Pengujian alur pendapatan diterima dimuka SKPKD

Keterangan	Form Inputan Penerimaan	Laporan Jurnal Akuntansi Penerimaan diterima di muka	Buku Besar/Buku Besar Pembantu Penerimaan	Laporan Register Penerimaan	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	1	1	4
Kabid. Pendapatan DPKD	1	1	1	1	4
Bidang Akuntansi DPKD	1	1	1	1	4
Total Nilai					12
Nilai Maks					12
Persentase Alur Aplikasi					100.00%

Sumber : Pengolahan data

Tabel. 4.7
Hasil Pengujian Pendapatan Diterima Dimuka SKPD

Keterangan	Form Inputan Penerimaan	Laporan Jurnal Akuntansi Penerimaan diterima di muka	Buku Besar/Buku Besar Pembantu Penerimaan	Laporan Register Penerimaan	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	1	1	4
Kabid. Pendapatan DPKD	1	1	1	1	4
Bidang Akuntansi DPKD	1	1	1	1	4
Total Nilai					12
Nilai Maks					12
Persentase Alur Aplikasi					100.00%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisisioner (Tabel 4.5 dan Tabel 4.6) yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas pemasukan data penerimaan diterima dimuka dan disediakan fasilitas untuk penerbitan laporan jurnal akuntansi, buku besar atau buku besar pembantu penerimaan, laporan register penerimaan, nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 12 dengan persentase nilai uji alur diterima dimuka 100 %.

Penjelasan dalam kuisisioner yang disampaikan oleh Kabid Akuntansi DPKD melalui kolom keterangan dalam kuisisioner mengenai alur pengelolaan pendapatan diterima di muka menggambarkan bahwa, secara garis besar aplikasi SIPKD sudah mengakomodir fasilitas pengelolaan pendapatan diterima dimuka tetapi untuk pengelolaan jurnal transaksi tersebut masih belum sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah, hal ini di sebabkan oleh tidak berfungsinya pemetaan rekening akuntansi yang harus dilakukan secara manual pada fasilitas mapping akun yang disediakan aplikasi SIPKD. Menurut Kabid

Akuntansi pelaksanaan mapping akun sudah dilaksanakan sesuai dengan yang tertera pada buku panduan aplikasi, namun hasil yang diinginkan masih belum bisa tercapai. Hal ini sangat mempengaruhi proses penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dimana akurasi laporan tersebut akan sangat diragukan dan tidak dapat untuk dijadikan pedoman pengambilan keputusan.

Penjelasan singkat mengenai teknis kendala yang terjadi pada pengelolaan pendapatan diterima di muka yang di sampaikan oleh Admin SIPKD DPKD bahwa solusi untuk jurnal transaksi pendapatan di terima di muka bisa di laksanakan dengan menerbitkan bukti memorial serta melaksanakan jurnal secara manual melalui fasilitas bukti memorial yang disediakan oleh aplikasi SIPKD.

Setelah dilakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD fasilitas untuk mengelola penerimaan diterima dimuka beserta laporan yang dijadikan kriteria pengujian dapat di sampaikan bahwa SIPKD menyediakan fasilitas pengelolaan pendapatan diterima dimuka.

4.2.1.1.1.4. Pengujian Alur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan Transfer.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat. Pendapatan dengan metode pendapatan transfer adalah dana DAU, DAK dan sebagainya adapun fitur yang akan dijadikan kriteria penguji adalah :

- a. Ada atau tidaknya form inputan penerimaan transfer.
- b. Ada atau tidaknya laporan jurnal penerimaan transfer.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan buku besar dan buku besar pembantu penerimaan transfer.

- d. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan register penerimaan.

Tabel. 4.8
Hasil Pengujian alur pendapatan tanpa penetapan
(transfer pemerintah) SKPKD

Keterangan	Form Inputan Penerimaan	Laporan Jurnal Akuntansi Penerimaan Transfer	Buku Besar/Buku Besar Pembantu Penerimaan	Laporan Register Penerimaan	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	1	1	4
Kabid. Pendapatan DPKD	1	1	1	1	4
Kabid Akuntansi DPKD	1	1	1	1	4
Total Nilai					12
Nilai Maks					12
Persentase Alur Aplikasi					100.00%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisisioner pada tabel 4.8 yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas pemasukan data penerimaan transfer dan disediakan fasilitas untuk penerbitan laporan jurnal akuntansi, buku besar/buku besar pembantu penerimaan, laporan register penerimaan, nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 12 dengan persentase nilai uji alur pendapatan transfer 100 %.

Setelah dilakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD fasilitas untuk mengelola pendapatan transfer beserta laporan yang dijadikan kriteria pengujian dapat di sampaikan bahwa SIPKD menyediakan fasilitas pengelolaan pendapatan transfer.

4.2.1.1.1.5. Pengujian Alur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja LS.

Belanja Langsung (LS) adalah belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai dampak adanya kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Belanja langsung (LS) adalah belanja pembayaran jasa atau barang sebagai penyelesaian pekerjaan yang terikat dengan Surat Perintah Kerja dengan pihak ke III, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- Ada atau tidaknya form inputan dasar SP2D LS (amprah gaji / BAST).
- Ada atau tidaknya laporan jurnal Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Ada atau tidaknya laporan jurnal Laporan Operasional (LO) dan Neraca.
- Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan Buku Besar pengeluaran.

Tabel. 4.9
Hasil Pengujian alur belanja LS

Keterangan	Form Dasar Perhitungan SP2D LS (Amprah Gaji/BAST)	Jurnal LRA	Jurnal LO dan Neraca	Buku Besar Pengeluaran	Total nilai
Admin SIPKD	0	1	0	1	2
Kabid Perbendaharaan DPKD	0	1	0	1	2
Kabid Akuntansi DPKD	0	1	0	1	2
PPK SKPD	0	1	0	1	2
Total Nilai					8
Nilai Maks					16
Persentase Alur Aplikasi					50.00%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian pada tabel 4.9 di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas pemasukan data untuk Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) tetapi tidak

menyediakan fasilitas untuk input amprah gaji, perhitungan amprah gaji dilakukan dengan aplikasi selain SIPKD sedangkan untuk proses jurnal pengeluaran kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), untuk proses jurnal Laporan Operasional (LO) pada jurnal umum bisa ditampilkan tetapi untuk kebutuhan neraca tidak bisa ditampilkan, untuk buku besar pengeluaran bisa dihasilkan di aplikasi SIPKD, nilai dari hasil olah data kuisioner adalah 8 dengan persentase nilai uji alur belanja LS 50 %.

Dari hasil penjelasan dalam keterangan kuisioner partisipan dalam pengujian pengelolaan alur belanja LS dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Kabid Perbendaharaan DPKD menyampaikan bahwa untuk melaksanakan penatausahaan belanja LS Gaji, DPKD Kabupaten Sijunjung menggunakan aplikasi pengelolaan gaji yang disediakan oleh PT.TASPEN sehingga penerbitan amprah gaji yang menjadi akun pembebanan belanja langsung per pegawai diakomodir oleh aplikasi yang disediakan PT.TASPEN, karena tidak ada fasilitas integrasi aplikasi yang disediakan oleh aplikasi SIPKD maka proses penerbitan belanja gaji hanya di pakai untuk menerbitkan SP2D gaji sebagai dokumen pencairan ke bank, adapun untuk perhitungan Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak disediakan oleh aplikasi SIPKD namun untuk fasilitas input BAST sebagai syarat penerbitan SP2D disediakan oleh SIPKD.
- b. Kabid Akuntansi DPKD menyampaikan bahwa sebenarnya SIPKD mempunyai modul Non Core untuk pengelolaan gaji namun tidak di implementasikan oleh Pemerintah Daerah Kab. Sijunjung karena sudah menggunakan aplikasi penggajian dari PT. TASPEN dampaknya terhadap

aplikasi SIPKD dengan tidak adanya modul integrasi aplikasi transaksi belanja gaji maka jurnal transaksi belanja gaji per pegawai tidak bisa dilaksanakan. Jurnal transaksi yang dilaksanakan pada modul pengelolaan belanja LS masih mengakomodir jurnal untuk keperluan LRA, sedangkan jurnal untuk kepentingan Laporan Operasional masih harus dilakukan jurnal manual di modul pertanggungjawaban sehingga menimbulkan duplikasi proses yang mana seharusnya ketika transaksi penerbitan SP2D dan pencairan dana SP2D dilaksanakan maka otomatis jurnal LRA dan jurnal LO di hasilkan dengan pedoman Permendagri No. 64 Tahun 2013 sehingga tidak memperlambat proses. Terkait jurnal transaksi BAST juga masih terkendala ketika dilakukan transaksi BAST 100% jurnal yang dihasilkan tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan jurnal transaksi BAST.

- c. Menurut admin SIPKD untuk mengakomodir kendala di atas harus dilakukan jurnal penyesuaian yaitu melakukan penerbitan bukti memorial untuk jurnal manual terhadap kendala tersebut.

Setelah dilakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD fasilitas untuk mengelola belanja LS memang tidak tersedia untuk pengelolaan amprah gaji dan jurnal neraca. Peneliti mencoba menguji aplikasi SIPKD ini dengan contoh kasus belanja LS dengan BAST dengan mekanisme termin 30 % maka untuk kasus ini aplikasi SIPKD pada menu utama menyediakan untuk transaksi rekanan dengan menyediakan menu BAST yang berisi nomor berita acara , jenis, tanggal berita acara, nomor kontrak uraian dengan memasukan rekening transaksi setelah dilaksanakan validasi transaksi langkah selanjutnya masuk ke menu

pertanggungjawaban untuk membuat jurnal LO (jurnal manual) untuk memvalidasi agar jurnalnya muncul sesuai pedoman:

Jalan kabupaten /kota (D)

Utang belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (K)

dan setelah dilaksanakan pencairan belanja tersebut maka jurnal yang terbit

Utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (D)

RK PPKD (K)

namun ketika dicoba dengan kasus belanja dibayarkan lunas 100 % tanpa termin maka ketika dibuat transaksi BAST aplikasi SIPKD tidak menerbitkan jurnal seperti ketika transaksi BAST dengan termin sebelumnya.

4.2.1.1.1.6. Pengujian Alur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja UP/GU/TU

Belanja UP/GU/TU adalah belanja langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai dampak adanya kegiatan atau program dengan mekanisme persediaan kas, sehingga pada awal pengelolaan kas disediakan dana (UP) untuk pembelanjaan kebutuhan kegiatan dan setelah dana kegiatan tersebut dipertanggung jawabkan maka diajukan lagi permintaan dana sebagai pengganti dana yang sudah dipertanggungjawabkan (GU), dan ketika terjadi kebutuhan tambahan dana kegiatan maka diajukan permintaan dana (TU). Belanja langsung (UP/GU/TU) adalah belanja operasional kantor, belanja perjalanan dinas, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya form inputan dasar SPM UP/GU/TU (SPJ).
- b. Ada atau tidaknya laporan jurnal Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- c. Ada atau tidaknya laporan jurnal Laporan Operasional (LO) dan Neraca.
- d. Ada atau tidaknya aplikasi menerbitkan laporan Buku Besar pengeluaran.

Tabel. 4.10
Hasil Alur Pengujian Metode Belanja UP/GU/TU SKPD

Keterangan	Form Dasar Perhitungan SPM UP/GU/TU (SPJ)	Jurnal LRA	Jurnal LO dan Neraca	Buku Besar Transaksi	Total Nilai
Admin SIPKD A	1	1	0	1	3
PPK-SKPD A	1	1	0	1	3
Admin SIPKD B	1	1	0	1	3
PPK-SKPD B	1	1	0	1	3
Total Nilai					12
Nilai Maks					16
Persentase Alur Aplikasi					75.00%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisisioner yang sudah diisi oleh subjek penelitian tabel 4.10 di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas pemasukan data SPJ sedangkan untuk proses jurnal pengeluaran kaitanya dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), untuk proses jurnal Laporan Operasional (LO) pada jurnal umum bisa ditampilkan tetapi untuk kebutuhan neraca tidak bisa ditampilkan, untuk buku besar pengeluaran bisa dihasilkan di aplikasi SIPKD, nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 12 dengan persentase nilai uji alur pendapatan transfer sebesar 75 %.

Setelah dilakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD fasilitas untuk mengelola belanja UP/GU/TU memang tidak tersedia untuk pengelolaan jurnal neraca.

4.2.1.1.7. Pengujian Alur Pelaporan SKPD

Pengujian pelaporan SKPD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait transaksi yang telah dilaksanakan baik transaksi Pendapatan maupun transaksi belanja, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya Jurnal Umum Transaksi.
- b. Ada atau tidaknya Fasilitas Mapping Rekening Bagan Akun Standar (BAS) Permendagri 64 tahun 2013.
- c. Ada atau tidaknya Fasilitas Mapping Laporan Operasional.
- d. Ada atau tidaknya kelengkapan jenis laporan keuangan.

Tabel 4.11
Hasil Alur pengujian penerbitan Laporan Keuangan SKPD

Keterangan	Jurnal Umum Transaksi	Fasilitas Mapping Rekening BAS Permen 64(Apabila anggaran dengan rek permen 59)	Fasilitas Mapping LO	Kelengkapan Jenis Laporan Keuangan	Total Nilai
Admin SIPKD A	1	1	1	1	4
PPK-SKPD A	1	1	1	1	4
Admin SIPKD B	1	1	1	1	4
PPK-SKPD B	1	1	1	1	4
Total Nilai					16
Nilai Maks					16
Persentase Alur Aplikasi					100.00%

Sumber : Pengolahan data

Pada tabel 4.11 hasil pengolahan data kuisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas jurnal umum transaksi, mapping BAS, mapping LO sedangkan untuk kelengkapan jenis laporan keuangan memang disediakan fasilitasnya tetapi tidak berjalan sesuai

fungsinya, menurut PPK SKPD duplikasi proses ketika transaksi dilaksanakan dengan membedakan proses antara Jurnal LRA ketika transaksi dilaksanakan dan harus melaksanakan proses validasi terhadap Jurnal LO membuat proses penyajian isi laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai bahkan bisa dikatakan tidak dapat disajikan, laporan keuangan pemerintah daerah yang masih bisa dihasilkan adalah Laporan Realisasi Anggaran karena jurnal dilaksanakan secara otomatis oleh aplikasi SIPKD, nilai dari hasil olah data kuisioner adalah 12 dengan persentase nilai uji alur pendapatan transfer 100 %.

Setelah dilakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD fasilitas untuk mengelola Laporan Keuangan SKPD memang tidak berfungsi sebagai mana mestinya untuk kelengkapan jenis laporan keuangan seperti misalnya menu laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tidak berjalan sesuai fungsinya.

4.2.1.1.1.8. Pengujian Alur Pelaporan SKPKD

Pengujian pelaporan SKPKD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait transaksi yang telah dilaksanakan baik transaksi Pendapatan maupun transaksi Belanja, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya fasilitas proses konsolidasi transaksi SKPD.
- b. Ada atau tidaknya fasilitas mapping rekening Bagan Akun Standar (BAS) Permendagri 64 tahun 2013.
- c. Ada atau tidaknya fasilitas mapping Laporan Operasional.
- d. Ada atau tidaknya kelengkapan jenis Laporan Keuangan.
- e. Ada atau tidaknya Jurnal Konsolidasi

Tabel 4.12
Hasil Alur pengujian Penerbitan Laporan Keuangan SKPKD

Keterangan	Proses Konsolidasi Lap keu SKPD	Fasilitas Mapping Rekening BAS Permen 64(Apabila anggaran dengan rek permen 59)	Fasilitas Maping LO	Kelengkapan Jenis Laporan Keuangan	Jurnal Konsolidasi	Total Nilai
Admin SIPKD	1	1	1	1	1	5
Kabid. Akuntansi	1	1	1	1	1	5
Total Nilai						10
Nilai Maks						10
Persentase alur						100.00%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisisioner pada tabel 4.12 yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas yang menjadi kriteria pengujian diatas sehingga nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 10 dari maximal nilai 10 dengan persentase nilai uji alur laporan keuangan SKPKD 100 %.

Menurut Kabid Akuntansi DPKD dalam alur penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SIPKD sudah mempersiapkan format Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tapi masih belum optimal dalam menyajikan isi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dikarenakan tidak sesuainya jurnal transaksi yang dihasilkan apalagi dengan adanya duplikasi proses sehingga membuat keraguan terhadap data yg disajikan, dan ketika data SKPD di konsolidasikan untuk di jadikan LKPD Kabupaen Sijunjung Laporan yang bisa disajikan hanya LRA.

Setelah dilakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD terhadap fasilitas untuk mengelola Laporan Keuangan SKPKD memang aplikasi menyediakan semua fungsi yang disebutkan dalam kriteria pengujian tetapi beberapa fasilitas tidak berjalan sesuai fungsinya seperti misalnya menu laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tidak berjalan sesuai fungsinya.

4.2.1.1.9. Rekapitulasi Hasil Pengujian Alur Aplikasi

Dari hasil pengujian aplikasi dengan metode kuisioner dan observasi alur aplikasi, maka peneliti bisa menyajikan rekapitulasi hasil uji alur aplikasi pada tabel 4.13 dengan penjabaran hasil akhir sebagai berikut :

Tabel. 4.13
Rekapitulasi Hasil Pengujian Alur Aplikasi

No	Kriteria Pengujian	Tingkat Terbantu	Kriteria Terbantu
A.	Pengelolaan Transaksi Sesuai SAPD Basis Akrual		
1	Pengujian Alur <i>Official Assesment</i> SKPKD	50,00%	Cukup Terbantu
2	Pengujian Alur <i>Official Assesment</i> SKPKD	50,00%	Cukup Terbantu
3	Pengujian <i>Self Assesment</i> SKPKD	100,00%	Sangat Terbantu
4	Pengujian <i>Self Assesment</i> SKPD	100,00%	Sangat Terbantu
5	Pengujian Pendapatan Diterima Dimuka SKPKD	100,00%	Sangat Terbantu
6	Pengujian Pendapatan Diterima Dimuka Skpd	100,00%	Sangat Terbantu
7	Pengujian Pendapatan Tanpa Penetapan SKPKD	100,00%	Sangat Terbantu
8	Pengujian Alur Belanja LS	50,00%	Cukup Terbantu
9	Pengujian Metode Belanja UP/GU/TU SKPD	75,00%	Terbantu
B.	Penerbitan laporan Sesuai SAPD Basis Akrual		
1	Pengujian Penerbitan Laporan Keuangan SKPD	100,00%	Sangat Terbantu
2	Pengujian Penerbitan Laporan Keuangan SKPKD	100,00%	Sangat Terbantu
	Rata - Rata Pengujian	90,28%	Sangat Terbantu

Sumber : Pengolahan data

SIPKD dalam mengakomodir SAPD basis akrual sudah mempersiapkan fungsi menu – menu aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari SAPD basis akrual, namun setelah diuji lebih mendalam dengan mengikuti petunjuk buku pedoman aplikasi SIPKD, peneliti banyak menemukan bahwa alur dalam aplikasi SIPKD ini masih sangat mengikuti proses manual pelaksanaan SAPD basis akrual sehingga proses yang berulang menimbulkan duplikasi kerja yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Sijunjung harus menyediakan petugas tambahan untuk mengikuti prosedur standar penggunaan aplikasi SIPKD tanpa memperhatikan tujuan utama penggunaan aplikasi yaitu efektifitas pekerjaan. Sebagai contoh dalam pengelolaan pendapatan yang menjadi tupoksi bidang pendapatan pada saat proses input transaksi penerimaan baik *Office Assesment* maupun *Self Assesment* harus mengikuti prosedur pengajuan penerimaan dan persetujuan penerimaan lalu dilakukan proses penyetoran yang memerlukan tanggal validasi, setelah prosedur di pendapatan selesai sampai dengan proses penyetoran, maka di bidang akuntansi yang mengelola proses pertanggungjawaban harus memberikan tanggal validasi kembali supaya transaksi tersebut bisa diakui sebagai transaksi pendapatan sehingga terjadi duplikasi kerja di bidang pendapatan dan akuntansi dengan sumber data yang sama. SIPKD juga tidak memberikan fasilitas koneksi atau integrasi horisontal dengan aplikasi lainnya yang sedang berjalan misalnya aplikasi yang mengakomodir pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga SPPT PBB atau Surat Ketetapan Pajak hasil penetapan aplikasi pengelola PBB sebanyak kurang lebih 90.000 SPPT harus di input ulang data atau input jurnal manual secara berkala ke SIPKD.

Pengujian alur SIPKD juga dilakukan dengan mencoba melakukan beberapa transaksi yang mendukung proses akrual basis, hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa beberapa menu aplikasi yang disediakan tidak berjalan sesuai dengan semestinya, sebagai contoh menu penetapan pendapatan ketika dilakukan transaksi pendapatan dengan penetapan sesuai petunjuk buku panduan aplikasi hasil yang ditampilkan tidak sesuai dengan proses penerimaan dengan penetapan itu sendiri, laporan yang dihasilkan dari transaksi tersebut tidak sesuai dengan proses SAPD akrual, menurut penjelasan admin, disfungsi menu penerimaan dengan penetapan diganti dengan input jurnal manual di menu aplikasi jurnal bukti memorial, hal ini akan menjadikan kendala pertama duplikasi kerja, dan yang kedua apabila petugas yang melaksanakan transaksi bukti memorial tidak memahami proses penjurnalan tersebut maka dampaknya akan terjadi salah pembebanan rekening yang berakibat kepada proses penyusunan LKPD.

4.2.1.1.2 Pengujian Identifikasi Transaksi

Dalam melaksanakan pengujian identifikasi transaksi ini yang menjadi ukuran penilaian adalah jurnal transaksi yang dihasilkan oleh aplikasi SIPKD dibandingkan dengan jurnal standar transaksi yang ada pada Permendagri No.64 Tahun 2013. Pengujian Identifikasi Transaksi ini menggunakan 47 kriteria tabel uji yang dituangkan dalam form kuisioner, sebagai pembanding dari hasil form kuisioner tersebut juga dilakukan observasi alur SIPKD dengan menguji laporan jurnal yang disediakan pada menu aplikasi SIPKD.

4.2.1.1.2.1 Pengujian Jurnal Pendapatan SKPKD

Pengujian identifikasi transaksi jurnal pendapatan SKPKD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait jurnal transaksi pendapatan SKPKD dengan kriteria pengujian jenis jurnal pendapatan yang ada pada Permendagri No. 64 tahun 2013, selain pengujian dilakukan dengan kuisioner, pengujian dilakukan juga dengan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya jurnal transaksi pendapatan pajak.
- b. Ada atau tidaknya jurnal transaksi pendapatan transfer.
- c. Ada atau tidaknya jurnal transaksi pendapatan hibah atau lain – lain pendapatan yang sah.
- d. Ada atau tidaknya Jurnal Konsolidasi

Tabel. 4.14
Hasil Pengujian Alur Pendapatan SKPKD

KETERANGAN	Admin SIPKD	Bidang Pendapatan DPPKAD	Bagian Akuntansi DPPKAD	Total Nilai
Pendapatan Asli Daerah				
1. Pendapatan Pajak				
a. Penerimaan Kas Daerah				
Kas di Kas Daerah (D)	1	1	1	
Pendapatan Pajak...-LO(K)				
b. SKP/SKR blm dibayar				
Piutang Pajak Daerah (D)	1	1	1	
Pendapatan Pajak...-LO(K)				
c. Realisasi Anggaran				
Estimasi Perubahan SAL (D)	1	1	1	
Pendapatan Pajak...-LRA(K)				

KETERANGAN	Admin SIPKD	Bidang Pendapatan DPPKAD	Bagian Akuntansi DPPKAD	Total Nilai
3. Pendapatan Transfer				
<i>a. Penerimaan Kas Daerah</i>				
Kas di Kas Daerah (D) Pendapatan Transfer...-LO(K)	1	1	1	
<i>b. Piutang Pendapatan</i>				
Piutang Pendapatan (D) Pendapatan Transfer...-LO(K)	1	1	1	
<i>c. Pembayaran Piutang Pendapatan</i>				
Kas di Kas Daerah (D) Piutang Pendapatan Transfer...(K)	1	1	1	
<i>d. Realisasi Anggaran</i>				
Estimasi Perubahan SAL (D) Pendapatan Transfer...LRA(K)	1	1	1	
4. Lain-lain Pend. Yg Sah				
Pendapatan Hibah				
<i>a. Penerimaan Kas Daerah</i>				
Kas di Kas Daerah (D) Pendapatan Hibah...-LO(K)	1	1	1	
<i>b. Penerimaan berupa Hibah Aset</i>				
Aset Tetap (D) Pendapatan Hibah...-LO(K)	0	0	0	
<i>c. Realisasi Anggaran</i>				
Estimasi Perubahan SAL (D) Pendapatan Hibah...LRA(K)	1	1	1	
Total Nilai	9	9	9	27
Nilai Maksimal				30
Persentase indentifikasi				90.00%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian pada tabel 4.14 di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas jurnal transaksi pendapatan SKPKD yang menjadi kriteria pengujian dapat disajikan kecuali jurnal pendapatan hibah sehingga nilai dari hasil olah data

kuisisioner adalah 27 dari maximal nilai 30 dengan persentase nilai uji alur jurnal pendapatan SKPKD 90 %.

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD terhadap fasilitas jurnal transaksi pendapatan SKPKD dengan berbagai contoh kasus sebagai berikut :

Ditransaksikan surat ketetapan pajak daerah Rp. 5.000.000 penginputan untuk data ini setelah divalidasi di penatausahaan maka otomatis di menu pertanggungjawaban untuk jurnal sesuai dengan peraturan yaitu piutang pajak didebet dan pendapatan pajak dikredit.

Piutang Pajak Daerah (D)	Rp. 5.000.000
Pendapatan Pajak - LO (K)	Rp. 5.000.000

Namun ketika transaksi penyetoran pajak tersebut aplikasi SIPKD tidak bisa terkoneksi sehingga piutang tidak berkurang, solusi yang disediakan oleh SIPKD adalah dengan jurnal manual yaitu menerbitkan bukti memorial atau jurnal khusus untuk sinkronisasi transaksi penyetoran tersebut. Hasil observasi tersebut bisa disimpulkan bahwa fasilitas jurnal transaksi pendapatan SKPKD disediakan oleh aplikasi SIPKD namun ketika ada fasilitas yang tidak bisa berfungsi dengan semestinya maka solusinya adalah jurnal manual dengan menerbitkan bukti memorial sehingga hal tersebut menuntut pengetahuan akuntansi tim yang mengerjakan jurnal manual tersebut dan beresiko kesalahan jurnal.

4.2.1.1.2.2 Pengujian Jurnal Pendapatan SKPD

Pengujian identifikasi transaksi jurnal pendapatan SKPD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait jurnal transaksi pendapatan SKPD dengan kriteria pengujian jenis jurnal pendapatan yang ada pada Permendagri No. 64 tahun 2013, selain pengujian dilakukan dengan kuisioner, pengujian dilakukan juga dengan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya jurnal transaksi pendapatan pajak.
- b. Ada atau tidaknya jurnal transaksi pendapatan retribusi.

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Pendapatan SKPD

KETERANGAN	Admin SIPKD	PPK SKPD	Total Nilai
1. Pendapatan Pajak			
<i>a. Jurnal LO</i>			
Kas di Bendahara Penerimaan (D)	1	1	
Pendapatan Pajak Daerah...LO (K)			
<i>b. Jurnal LRA</i>			
Estimasi Perubahan SAL (D)	1	1	
Pendapatan Pajak Daerah... LRA (K)			
c. Penyetoran STS			
RK PPKD (D)	1	1	
Kas di Bendahara Penerimaan (K)			
d.SKP Belum Lunas			
Piutang Pajak Daerah... (D)	1	1	
Pendapatan Pajak Daerah...LO (K)			

KETERANGAN	Admin SIPKD	PPK SKPD	Total Nilai
a. Jurnal LO			
Kas di Bendahara Penerimaan (D)	1	1	
Pendapatan Ret. Daerah...LO (K)			
b. Jurnal LRA			
Estimasi Perubahan SAL (D)	1	1	
Pendapatan Ret. Daerah... LRA (K)			
c. Penyetoran STS			
RK PPKD (D)	1	1	
Kas di Bendahara Penerimaan (K)			
d. SKR Belum Lunas			
Piutang Ret. Daerah... (D)	1	1	
Pendapatan Ret. Daerah...LO (K)			
Total Nilai	8	8	16
Nilai Maksimal			16
persentase indentifikasi			100.00%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian pada tabel 4.15 di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas jurnal transaksi pendapatan SKPD yang menjadi kriteria pengujian dapat disajikan sehingga nilai dari hasil olah data kuisioner adalah 16 dari maksimal nilai 16 dengan persentase nilai uji jurnal pendapatan SKPD 100 %.

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD terhadap fasilitas jurnal transaksi pendapatan SKPD dengan contoh kasus sebagai berikut : Bendahara penerima menerima pajak makan sebesar Rp. 4.000.000, kemudian menyetorkan ke kasda sebesar Rp. 4.000.000, untuk transaksi tersebut bendahara penerima membuat transaksi tanda bukti penerimaan (TBP) ke menu penerimaan pengajuan, transaksi ini belum bisa langsung dijurnal karena butuh proses

persetujuan dan harus dibku kan dulu dan untuk melakukan proses jurnal harus masuk kemenu pertanggungjawaban untuk divalidasi di jurnal LO dulu, baru jurnal akan muncul, begitu juga penyeteran yang telah disetor, transaksi ini juga tidak langsung dijurnal karena butuh proses persetujuan dan harus dibku kan dulu dan untuk melakukan proses jurnal harus masuk kemenu pertanggungjawaban untuk divalidasi di jurnal LO dan jurnal LRA.

Setelah proses tersebut dilakukan maka jurnal yang dihasilkan :



Kas di bendahara penerimaan (D)	Rp. 4.000.000
Pendapatan Pajak Rumah Makan – LO (K)	Rp. 4.000.000
Estimasi Perubahan SAL (D)	Rp. 4.000.000
Pendapatan Pajak Rumah Makan – LRA (K)	Rp. 4.000.000

Setelah bendahara menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas Daerah maka terbit jurnal sebagai berikut :

RK PPKD (D)	Rp. 4.000.000
Kas di bendahara penerimaan (K)	Rp. 4.000.000

4.2.1.1.2.3 Pengujian Jurnal Belanja dan Beban SKPKD

Pengujian identifikasi transaksi jurnal beban dan belanja SKPKD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait jurnal transaksi beban dan belanja SKPKD dengan kriteria pengujian jenis jurnal beban dan belanja yang ada pada Permendagri No. 64 tahun 2013, selain pengujian dilakukan dengan kuisisioner, pengujian dilakukan juga dengan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya jurnal transaksi belanja hibah.
- b. Ada atau tidaknya jurnal transaksi belanja bantuan sosial.
- c. Ada atau tidaknya jurnal transaksi belanja transfer bagi hasil pajak daerah
- d. Ada atau tidaknya jurnal transaksi belanja bantuan keuangan.
- e. Ada atau tidaknya Jurnal Konsolidasi.

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Jurnal Beban dan belanja SKPKD

KETERANGAN	Admin SIPKD	Kabid Perbend DPKD	Kabid Akuntansi DPKD	Total Nilai
1. Beban Hibah				
a. Penerbitan NHPD				
Jurnal LO & Neraca				
Beban Hibah.... (D)	0	0	0	
Utang Belanja lain - lain(K)				
b. Pembayaran Hibah				
Jurnal LO & Neraca				
Utang Belanja lain -lain (D)	0	0	0	
Kas di Kas Daerah (K)				
Jurnal LRA				
Belanja Hibah (D)	1	1	1	
Perubahan SAL (K)				
2. Beban Bantuan Sosial				
a. Penerbitan SK KDH				
Jurnal LO & Neraca				
Beban Bantuan Sosial.... (D)	0	0	0	
Utang Belanja lain - lain(K)				
b. Pembayaran Bantuan Sosial				
Jurnal LO & Neraca				
Utang Belanja lain -lain (D)	0	0	0	
Kas di Kas Daerah (K)				

KETERANGAN	Admin SIPKD	Kabid Perbend DPKD	Kabid Akuntansi DPKD	Total Nilai
Jurnal LRA				
Belanja Bantuan Sosial (D)	1	1	1	
Perubahan SAL (K)				
3. Beban Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
a. Penerbitan SK KDH				
Jurnal LO & Neraca				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak (D)	0	0	0	
Utang transfer bg. Hsl pjg(K)				
b. Pembayaran Transfer Bagi Hasil				
Jurnal LO & Neraca				
Utang trf.bg.hsl.pjk (D)	0	0	0	
Kas di Kas Daerah (K)				
Jurnal LRA				
Transfer Bg.Hsl.Pjk (D)	1	1	1	
Perubahan SAL (K)				
4. Beban Belanja Bantuan Keuangan				
a. Penerbitan SK KDH				
Jurnal LO & Neraca				
Beban Transfer Bantuan Keuangan (D)	0	0	0	
Utang transfer BK(K)				
b. Pembayaran Transfer BK				
Jurnal LO & Neraca				
Utang trf.BK (D)	0	0	0	
Kas di Kas Daerah (K)				
Jurnal LRA				
Transfer BK (D)	1	1	1	
Perubahan SAL (K)				
Total Nilai	4	4	4	12
Nilai Maks				36
Persentase indentifikasi				33.33%

Sumber : Pengolahan data

Pada tabel 4.16 hasil pengolahan data kuisisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk

jurnal transaksi beban dan belanja SKPKD tetapi dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan pedoman dalam bagan akun standar yang disajikan pada Permendagri No. 64 tahun 2013 sehingga nilai dari hasil olah data kuisioner adalah 12 dari maksimal nilai 36 dengan persentase nilai uji alur laporan keuangan SKPKD 33,33 %.

Selain melakukan uji kuisioner peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD terhadap fasilitas untuk mengelola beban dan belanja SKPKD dengan melakukan transaksi beban dan belanja menggunakan contoh kasus sebagai berikut :

Diterbitkan SK tentang pemberian Hibah Rp. 4.000.000, pada saat transaksi ini jurnal LO dan neraca tidak dapat dihasilkan karena kendala dengan mapping pada Aplikasi SIPKD yang telah dilaksanakan sesuai buku petunjuk aplikasi, begitu juga pada saat pembayaran, yang bisa dihasilkan dalam aplikasi SIPKD adalah jurnal LRA yaitu :

Belanja Hibah (D) Rp. 4.000.000

Perubahan SAL (K) Rp. 4.000.000

Untuk transaksi belanja transfer bagi hasil pajak dan belanja bantuan keuangan yang berfungsi juga jurnal untuk LRA saja.

Sedangkan untuk mengkomodir transaksi BAST diuji dengan contoh kasus sebagai berikut :

Dibayarkan dana pembayaran rigid jalan 95% kegiatan prasarana dasar lingkungan perumahan Rp. 93.100.000,- untuk kasus ini aplikasi SIPKD pada menu utama menyediakan untuk transaksi rekanan dengan menyediakan BAST

yang berisi nomor berita acara , jenis, tanggal berita acara, nomor kontrak uraian dan memasukan rekening transaksi setelah itu divalidasi kemudian masuk ke jurnal LO untuk validasi sehingga jurnal yang terbit

Jalan kabupaten /kota (D) Rp.93.100.000

Utang belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (K) Rp.93.100.000

ketika transaksi pembayaran pekerjaan ini sudah dilaksanakan maka akan terbit jurnal

Utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (D) Rp. 93.100.000

RK PPKD (K) Rp.93.100.000,

Namun ada kondisi apabila pembayaran pekerjaan dengan mekanisme BAST tanpa termin sehingga pembayaran dilaksanakan 100% maka ketika BAST ditransaksikan jurnal transaksi tidak bisa dihasilkan dari aplikasi SIPKD karena tidak ditemukan kesesuaian rekening, hal ini adanya permasalahan pada mapping rekening jurnal yang akan berpengaruh kepada rekening pada buku besar dan neraca saldo.

4.2.1.1.2.4 Pengujian Jurnal Belanja dan Beban SKPD

Pengujian identifikasi transaksi jurnal beban dan belanja SKPD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait jurnal transaksi Beban dan Belanja SKPD dengan kriteria pengujian jenis jurnal Beban dan Belanja yang ada pada Permendagri No. 64 tahun 2013, selain pengujian dilakukan dengan kuisisioner, pengujian dilakukan juga dengan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah:

- a. Ada atau tidaknya jurnal transaksi beban dan belanja pegawai.
- b. Ada atau tidaknya jurnal transaksi beban dan belanja barang jasa.
- c. Ada atau tidaknya jurnal transaksi pengembalian beban dan belanja.

Tabel 4.17
Hasil Pengujian Jurnal Beban dan belanja SKPD

KETERANGAN	Admin SIPKD	PPK SKPD	Total Nilai
1. Beban & Belanja Pegawai			
Jurnal LO & Neraca			
Beban Gaji (D)	0	0	
RK PPKD(K)			
Jurnal LRA			
Beban Gaji Pokok (D)	0	0	
Perubahan SAL(K)			
Jurnal UP/GU/TU			
Jurnal LO & Neraca			
Kas di Bendahara Pengeluaran (D)	1	1	
RK PPKD(K)			
Beban Gaji Pokok (D)	1	1	
Kas di Bendahara Pengeluaran (K)			
Jurnal LRA			
Beban Gaji Pokok (D)	1	1	
Perubahan SAL (K)			
UP/GU/TU			
Jurnal LO & Neraca			
Uang Lembur PNS (D)			
Kas di Bendahara Pengeluaran (K)			
Jurnal LRA			
Uang Lembur PNS (D)	1	1	
Perubahan SAL (K)			
2. Beban & Belanja Barang Jasa			
a. Dengan Mekanisme UP			
Belanja Brg & Jasa (D)	1	1	
Kas Di Bendahara Pengeluaran (K)			

KETERANGAN	Admin SIPKD	PPK SKPD	Total Nilai
b. Belanja Bahan Habis Pakai			
Bahan Persediaan (D)	1	1	
Kas Di Bendahara Pengeluaran (K)			
Jurnal LRA			
Belanja Brg&Jasa (D)	1	1	
Estimasi Perubahan SAL (K)			
c. Dengan Mekanisme LS			
Berdasar BAST			
Belanja Brg& Jasa... (D)	1	1	
Utang Bli Brg&Jasa ... (K)			
Pembayaran Beban(SP2D)			
Utang Belanja Brg... (D)	1	1	
RK PPKD ... (K)			
Jurnal LRA			
Belanja (D)	1	1	
Estimasi Perubahan SAL (K)			
Pengajuan GU			
Kas di Bendahara Pengeluaran(D)	1	1	
RK PPKD (K)			
Belanja Sewa			
Belanja Sewa (D)			
Belanja Sewa di Bayar Di Muka (D)	1	1	
RK PPKD (K)			
3. Pengembalian Beban			
Kas di Bendahara Pengeluaran(D)	1	1	
Beban (K)			
Jurnal LRA			
Estimasi Perubahan SAL (D)	1	1	
Belanja ... (K)			
Total Nilai	15	15	30
Nilai maks			34
persentase indentifikasi			88.24%

Sumber: Pengolahan data

Pengolahan data kuisisioner pada tabel 4.17 yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk jurnal transaksi beban dan belanja SKPD tetapi dalam beberapa kasus tidak sesuai

dengan pedoman dalam bagan akun standar yang disajikan pada Permendagri No. 64 tahun 2013 sehingga nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 30 dari maksimal nilai 34 dengan persentase nilai uji alur laporan keuangan SKPD 88,24 %.

Selain melakukan uji kuisisioner peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD terhadap fasilitas untuk mengelola beban dan belanja SKPD dengan melakukan transaksi beban dan belanja menggunakan contoh kasus sebagai berikut :

Diterima SP2D LS untuk pembayaran gaji bulan Januari 2015 sebesar Rp. 70.000.000 dengan rincian gaji pokok Rp.45.000.000, belanja tunjangan keluarga Rp. 15.000.000, belanja tunjangan Rp. 10.000.000 dari BUD, untuk transaksi diatas kita harus melaksanakan proses input BKU SP2D LS sehingga jurnal transaksi tersebut akan muncul pada jurnal umum yaitu

Beban gaji (D) Rp. 70.000.000

RK PPKD (K) Rp. 70.000.000

Setelah validasi pada pertanggungjawaban serta validasi jurnal LO dan LRA dilaksanakan maka jurnal yang terbit adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan anggaran beban gaji (D) Rp. 70.000.000

Perubahan SAL (K) Rp. 70.000.000

4.2.1.1.2.5 Rekapitulasi Hasil Pengujian Identifikasi Transaksi

Hasil akhir aplikasi dalam pengujian Identifikasi transaksi ini indikator yang menjadi ukuran penilaian adalah ada tidaknya proses jurnal transaksi dalam aplikasi SIPKD sesuai Permendagri No. 64 tahun 2013 serta menguji apakah jurnal

akuntansi yang dihasilkan oleh aplikasi dalam pengelolaan transaksi apakah sudah sesuai dengan SAPD (Standar Akuntansi Pemerintah Daerah) basis akrual. SOP dari SIPKD adalah bahwa sebelum melaksanakan transaksi, ada fungsi pemetaan rekening APBD dengan rekening akuntansi sehingga memang diperlukan ketelitian dalam memetakan rekening APBD ke Bagan Akun Standar yang ada pada Permendagri No. 64 tahun 2013, hal ini sangat dikeluhkan oleh user, menurut Kabid Akuntansi yang mempunyai kebutuhan tinggi terhadap ketepatan jurnal transaksi ini menyampaikan dalam keterangan kuisisioner antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa proses mapping ini seharusnya sudah dilakukan secara otomatis oleh aplikasi karena untuk pemetaan rekening APBD dan rekening Bagan Akun Standar sudah ada panduannya dari peraturan pemerintah, apabila ada penambahan rekening baru dilakukan perlakuan khusus untuk mapping rekening sehingga kesalahan pemetaan rekening karena ketidak pahaman user akan proses akuntansi bisa di hindari untuk penyajian laporan keuangan yang kebenarannya tidak diragukan.
- b. Alur jurnal transaksi dalam aplikasi SIPKD juga harus di lakukan perbaikan lebih mendasar karena ada jurnal transaksi yang sudah sesuai dengan pedoman jurnal Permendagri No. 64 tahun 2013 ada yang belum sesuai, dan alur jurnal transaksi yang seharusnya berkaitan dengan proses – proses sebelumnya tidak bisa dihasilkan oleh aplikasi SIPKD yang di implementasikan di Pemerintah Kabupaten Sijunjung seperti misalnya pada transaksi penerbitan sampai penyeteroran SKP, penerbitan BAST sampai pembayaran belanja untuk pembayaran belanja tanpa termin.

c. Untuk proses Jurnal LRA, Jurnal LO dan Jurnal akuntansi yang berhubungan langsung dengan proses transaksi seharusnya sudah dilakukan secara otomatis oleh aplikasi SIPKD sesuai pedoman pada Permendagri No.64 tahun 2013 dan PP. 71 tahun 2010 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, sehingga tidak menimbulkan duplikasi proses yang menyebabkan duplikasi kerja dan kesalahan jurnal. Fasilitas jurnal manual disediakan untuk mengakomodir transaksi khusus misalnya perbaikan kesalahan transaksi atau adanya transaksi penyesuaian sehingga perlu jurnal penyesuaian.

Dari hasil observasi fasilitas mapping akun tersebut terkadang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga banyak jurnal transaksi yang tidak bisa dilaksanakan ketika transaksi Pendapatan atau beban dan belanja ditransaksikan . Pengujian Alur Aplikasi pada tabel 4.18 menggunakan 50 kriteria tabel uji kuisisioner dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.18
Rekapitulasi Hasil Pengujian indentifikasi

No	Kriteria Pengujian	Tingkat Terbantu	Kriteria Terbantu
1	Jurnal Pendapatan SKPKD	90,00%	Sangat Terbantu
2	Jurnal Pendapatan SKPD	100,00%	Sangat Terbantu
3	Jurnal Beban dan Belanja SKPKD	33,33%	Tidak Terbantu
4	Jurnal Beban dan Belanja SKPD	88,24%	Sangat Terbantu
	Rata - rata pengujian	77,89%	Terbantu

Sumber : Pengolahan data

SIPKD dalam mengakomodir jurnal transaksi baik transaksi pendapatan maupun transaksi beban dan belanja secara *single transaction* atau transaksi tunggal maka jurnal transaksi yang disajikan sudah sesuai dengan pedoman dalam Permendagri No. 64 tahun 2013, misalnya transaksi penerimaan pendapatan pada

bendahara penerimaan maka SIPKD akan melakukan proses jurnal yang sesuai, tetapi ketika dilaksanakan transaksi *multi transaction* proses atau transaksi dengan proses yang lebih dari satu, misalkan administrasi pendapatan dengan penetapan (*Official Asesment*), maka ada proses jurnal yang tidak berjalan sesuai fungsinya, sehingga user aplikasi mengatasinya dengan jurnal manual yaitu menerbitkan bukti memorial serta input jurnal manual dan ketika user kurang memahami proses akuntansinya kecenderungan kesalahan jurnal akan terjadi, dampaknya laporan atas dasar transaksi tersebut hasilnya tidak sesuai.

4.2.1.1.3 Indikator Hasil Akhir Aplikasi

Hasil Akhir Aplikasi, dalam pengujian hasil akhir aplikasi peneliti menyediakan kuisioner dengan 39 kriteria yang mengacu kepada penerbitan hasil akhir aplikasi yaitu komponen LKPD, adapun hasil kuisioner tersebut adalah sebagai berikut :

4.2.1.1.3.1 Pengujian Jenis Laporan Keuangan

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator Jenis Laporan Keuangan dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan Laporan Perubahan Saldo.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan Laporan Operasional.
- d. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan Laporan Perubahan Ekuitas.

- e. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan Laporan Arus Kas.
- f. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan Laporan Neraca

Tabel 4.19
Hasil Pengujian Jenis Laporan Keuangan

Keterangan	LRA	LO	NERACA	LPE	LPS	LAK	Total Nilai
Admin SIPKD	1	0	0	0	0	0	1
Bidang Akuntansi PPKD	1	0	0	0	0	0	1
Total Nilai							2
Nilai Maks							12
persentase indentifikasi							16.67%

Sumber : Pengolahan data

Pengolahan data kuisisioner pada tabel 4.19 yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak laporan LRA, LO, LPSAL, LPE, LAK dan Neraca tetapi laporan yang berhasil di tampilkan dari ke enam laporan tersebut adalah laporan LRA sedangkan untuk ke lima laporan lainnya tidak dapat di hasilkan oleh SIPKD yang di implementasikan di Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sehingga nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 2 dari maksimal nilai 12 dengan persentase nilai uji hasil akhir aplikasi SKPD 16,67 %.

Kabid akuntansi dalam keterangannya bahwa semua fasilitas pelaporan dalam SIPKD sudah tersedia pada menu aplikasi pelaporan, tetapi karena kendala proses yang terkadang tidak terkoneksi antara proses transaksi sebelumnya dengan transaksi selanjutnya seperti pada proses SKP dan BAST tanpa termin membuat isi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak bisa di yakini kebenarannya sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat di

ragukan kecuali untuk Laporan Realisasi Anggaran. Dengan memakai metode jurnal LRA yang langsung di proses oleh aplikasi ketika terjadi transaksi maka informasi realisasi yang disampaikan di laporan LRA masih dapat diyakini kebenarannya apabila di dibandingkan dengan laporan manual pemda. Sebagai catatan bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga melaksanakan pembukuan manual dalam pengelolaan keuangan daerah akibat keraguan terhadap kinerja dan hasil dari aplikasi SIPKD.

4.2.1.1.3.2 Pengujian LRA SKPD

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator LRA SKPD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan Realisasi Anggaran SKPD, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD format Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD struktur Laporan Realisasi Anggaran.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 4.20
Hasil Pengujian LRA SKPD

Keterangan	Format LRA	Struktur LRA	Validitas Realisasi (Neraca Saldo pembanding)	Total Nilai
Admin SIPKD	1	1	1	3
PPK SKPD	1	1	1	3
Total Nilai				6
Nilai Maks				6
persentase hasil				100.00%

Sumber : Pengolahan data

Hasil pengolahan data kuisisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak laporan LRA, dengan nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 6 dari maksimal nilai 6 dengan persentase nilai uji hasil akhir aplikasi SKPD 100 % dapat dilihat pada tabel 4.19.

Menurut Kabid Akuntansi sesuai keterangan yang ada pada form kuisisioner, pengujian validitas Laporan Realisasi Anggaran dilakukan dengan membandingkan perhitungan hasil pengelolaan keuangan dari pembukuan manual dengan hasil Laporan Realisasi Anggaran yang di hasilkan oleh SIPKD, hasilnya memang valid dan sesuai, begitu juga yang disampaikan oleh PPK SKPD DPKD, Dishub dan Pekerjaan Umum bahwa untuk Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan oleh SIPKD sudah cukup sesuai dengan pembukuan manual mereka.

4.2.1.1.3.3 Pengujian LPSAL SKPD

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator LPSAL SKPD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan Perubahan Saldo SKPD, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD format LPSAL.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD struktur LPSAL.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam LPSAL.

Hasil kriteria uji pada SKPD laporan Perubahan Saldo dapat dilihat pada tabel 4.21 dibawah ini:

Tabel 4.21
Hasil Pengujian LPSAL SKPD

Keterangan	Format Laporan SAL	Struktur Laporan SAL	Validitas Realisasi	Total Nilai
Admin SIPKD	1	1	0	2
Bidang Akuntansi	1	1	0	2
Total Nilai				4
nilai Maks				6
Persentase hasil akhir				66.67%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak laporan LPSAL tetapi struktur dan validitas laporannya tidak bisa dihasilkan dengan nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 4 dari maksimal nilai 6 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Aplikasi SKPD 66,67 %.

SIPKD dalam melakukan transaksi jurnal selain jurnal LRA masih menggunakan duplikasi proses seperti jurnal LO serta metode manual yaitu dengan menerbitkan bukti memorial untuk jurnal penyesuaian sebagai contohnya untuk mengakomodir jurnal akuntansi pengelolaan pendapatan *official assessment* (SKP) maka harus menerbitkan bukti memorial untuk menghasilkan jurnal akuntansi tersebut, sehingga besar kesalahan proses transaksi jurnal tersebut dan mengakibatkan laporan neraca Saldo tidak valid dampaknya laporan perubahan SAL juga tidak bisa dihasilkan.

4.2.1.1.3.4 Pengujian Laporan Operasional SKPD

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator Laporan Operasional SKPD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan Operasional SKPD, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD format Laporan Operasional.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD struktur Laporan Operasional.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam Laporan Operasional.

Hasil kuesioner untuk uji laporan operasional SKPD pada tabel 4.22 dibawah ini:

Tabel 4.22
Hasil Pengujian Laporan Operasional SKPD

Keterangan	Format LO	Struktur LO	Validitas Jumlah Realisasi(Perbandingan dengan LRA)	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	0	2
PPK-SKPD	1	1	0	2
Total Nilai				4
nilai Maks				6
persentase hasil akhir				66.67%

Sumber : Pengolahan data

SIPKD dalam melakukan transaksi jurnal selain jurnal LRA masih menggunakan duplikasi proses seperti jurnal LO serta metode manual yaitu dengan menerbitkan bukti memorial untuk jurnal penyesuaian sebagai contohnya untuk mengakomodir jurnal akuntansi pengelolaan pendapatan *official assessment* (SKP) maka harus menerbitkan bukti memorial untuk menghasilkan jurnal akuntansi tersebut, sehingga besar kesalahan proses transaksi jurnal tersebut dan mengakibatkan Laporan Operasional tidak bisa dihasilkan.

Dari hasil pengolahan data kuisisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak Laporan Operasional tetapi struktur dan validitas laporannya tidak bisa dihasilkan,

dengan nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 4 dari maksimal nilai 6 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Aplikasi Laporan Operasional SKPD 66,67 %.

4.2.1.1.3.5 Pengujian Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator Laporan Perubahan Ekuitas SKPD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan Perubahan Ekuitas SKPD, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD format Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD struktur Laporan Perubahan Ekuitas.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 4.23
Hasil Pengujian Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

Keterangan	Format LPE	Struktur LPE	Validitas Realisasi (Perbandingan dengan LO)	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	0	2
PPK-SKPD	1	1	0	2
Total Nilai				4
nilai Maks				6
persentase hasil akhir				66.67%

Sumber : Pengolahan data

SIPKD dalam melakukan transaksi jurnal selain jurnal LRA masih menggunakan duplikasi proses seperti jurnal LO, Jurnal Neraca serta metode manual yaitu dengan menerbitkan bukti memorial untuk jurnal penyesuaian sebagai contohnya untuk mengakomodir jurnal akuntansi pengelolaan pendapatan official assessment (SKP) maka harus menerbitkan bukti memorial untuk

menghasilkan jurnal akuntansi tersebut, sehingga besar kesalahan proses transaksi jurnal tersebut dan mengakibatkan Laporan Perubahan Ekuitas tidak bisa dihasilkan.

Dari hasil pengolahan pada tabel 4.23 data kuisisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak Laporan Perubahan Ekuitas tetapi struktur dan validitas laporannya tidak bisa dihasilkan, dengan nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 4 dari maximal nilai 6 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Aplikasi LPE SKPD 66,67 %.

4.2.1.1.3.5 Pengujian Neraca SKPD

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan Laporan Neraca SKPD dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan Neraca SKPD, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD format Laporan Neraca.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD struktur Laporan Neraca.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam Laporan Neraca.

Tabel 4.24
Hasil Pengujian Neraca SKPD

Keterangan	Format Neraca	Struktur Neraca	Validitas Jumlah Realisasi	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	0	2
PPK-SKPD	1	1	0	2
Total Nilai				4
nilai Maks				6
persentase hasil akhir				66.67%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisioner pada tabel 4.24 yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak Laporan Neraca tetapi struktur dan validitas laporannya tidak bisa dihasilkan, dengan nilai dari hasil olah data kuisioner adalah 4 dari maksimal nilai 6 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Aplikasi SKPD 66,67 %.

SIPKD dalam melakukan transaksi jurnal selain jurnal LRA masih menggunakan duplikasi proses seperti jurnal LO, Jurnal Neraca serta metode manual yaitu dengan menerbitkan bukti memorial untuk jurnal penyesuaian sebagai contohnya untuk mengakomodir jurnal akuntansi pengelolaan pendapatan *official assessment* (SKP) maka harus menerbitkan bukti memorial untuk menghasilkan jurnal akuntansi tersebut, sehingga besar kesalahan proses transaksi jurnal tersebut dan mengakibatkan Laporan Neraca SKPD tidak bisa dihasilkan.

4.2.1.1.3.6 Pengujian LRA Konsolidasi

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan

Realisasi Anggaran Konsolidasi. Dalam proses manual penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan Kertas Kerja Konsolidasi yang berisi Neraca Saldo SKPD dan PPKD, membuat Jurnal Eliminasi, membuat Neraca Saldo Pemda.
- b. Setelah Kertas Kerja selesai disusun maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan realisasi anggaran Pemda dan membuat Jurnal Penutup LRA dan Neraca Saldo setelah penutupan LRA
- c. Setelah LRA selesai disusun maka langkah selanjutnya menyusun Laporan Operasional Pemda dan membuat Jurnal Penutup LO dan Neraca Saldo setelah penutupan LO
- d. Setelah LO selesai disusun maka langkah selanjutnya menyusun Laporan Neraca Pemda dan membuat Jurnal Penutup Akhir dan Neraca Saldo Akhir
- e. Kemudian setelah Neraca Pemda selesai disusun maka proses selanjutnya adalah penyusunan Laporan Perubahan SAL
- f. Setelah Laporan Perubahan SAL selesai maka langkah selanjutnya adalah menyusun Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Setelah Laporan Perubahan SAL selesai disusun maka langkah selanjutnya adalah penyusunan Laporan Arus Kas Pemda

Dengan memperhatikan proses manual penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di atas maka pengujian terhadap Laporan Konsolidasi LRA Pemda menggunakan kriteria penguji sebagai berikut :

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD format Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD struktur Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi.

Tabel 4.25
Hasil Pengujian LRA Konsolidasi

Keterangan	Format LRA	Struktur LRA	Validitas Jumlah Realisasi(LRA Gabungan)	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	1	3
Kabid. Akuntansi DPKD	1	1	1	3
Total Nilai				6
nilai Maks				6
persentase hasil akhir				100.00%

Sumber : Pengolahan data

Pada tabel 4.25 pengolahan data kuisisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi dengan struktur dan validitas laporannya sesuai serta bisa dihasilkan, dengan nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 6 dari maksimal nilai 6 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Aplikasi Laporan Realisasi Anggaran 100 %.

Dengan mengikuti pedoman manual penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada pada Panduan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Permendagri No.64 tahun 2013 maka peneliti melakukan observasi terhadap SIPKD mengenai proses penerbitan LRA Pemda. Dalam aplikasi SIPKD modul pertanggungjawaban terdapat menu cetak kertas

kerja, peneliti mencoba mencetak laporan kertas kerja dengan maksud untuk membandingkan dengan LRA yang dihasilkan oleh aplikasi SIPKD dan ternyata kertas kerja yang di hasilkan hanya format kertas kerja yang berisi Nama SKPD, pos penerimaan dan belanja tanpa adanya realisasi dari pos – pos tersebut. Peneliti mencoba lagi melihat buku panduan aplikasi dengan asumsi bahwa ada SOP yang terlewatkan, pada akhir proses realisasi pos penerimaan dan belanja dari kertas kerja hasil penyajian SIPKD tetap masih tidak menampilkan jumlah realisasi, ketika peneliti mencoba menanyakan kepada admin SIPKD DPKD peneliti hanya mendapatkan jawaban bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan mapping rekening atau pemetaan rekening. Dari observasi tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa alur aplikasi SIPKD masih parsial atau bisa dikatakan tidak terhubung antara proses penyajian LRA dengan Kertas Kerja yang menurut pedoman petunjuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Permendagri No. 64 tahun 2013, karena aplikasi SIPKD dapat menghasilkan LRA Konsolidasi tanpa dasar realisasi yang disajikan pada Kertas Kerja hasil penyajian SIPKD.

4.2.1.1.3.7 Pengujian Laporan Operasional Konsolidasi

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator Laporan Operasional Konsolidasi dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan Operasional Konsolidasi, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria penguji adalah:

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD format Laporan Operasional Konsolidasi.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD struktur Laporan Operasional Konsolidasi.

- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam Laporan Operasional Konsolidasi.

Tabel 4.26
Hasil Pengujian LO konsolidasi

Keterangan	Format LO	Struktur LO	Validitas Jumlah Realisasi(LO Gabungan)	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	0	2
Kabid. Akuntansi DPKD	1	1	0	2
Total Nilai				4
Nilai Maks				6
Persentase hasil akhir				66.67%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisisioner yang sudah diisi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak Laporan Operasional Konsolidasi tetapi untuk struktur dan validitas laporannya tidak bisa dihasilkan, dengan nilai dari hasil olah data kuisisioner (tabel 4.26) adalah 4 dari maksimal nilai 6 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Aplikasi LO konsolidasi sebesar 66,67 %.

Observasi Laporan Operasional yang disajikan oleh Aplikasi SIPKD dalam hal ini peneliti mencoba membandingkan dengan satu akun pendapatan dan satu akun belanja dalam LRA dengan realisasi yang ada pada Laporan Operasional Konsolidasi, hasil yang peneliti dapatkan adalah realisasi antara LRA dan LO tidak sesuai sehingga validitas realisasi LO sangat di ragukan, ketika peneliti mencoba mencari informasi dengan bertanya ke admin SIPKD DPKD jawaban yang disampaikan adalah ada kendala mapping aplikasi, sehingga harus cek data mapping satu persatu untuk seluruh akun transaksi dalam SIPKD. Dilihat

dari SOP aplikasi kendala timbul karena adanya duplikasi proses jurnal transaksi dimana ketika transaksi selesai dilaksanakan jurnal LRA otomatis disajikan namun untuk jurnal LO harus dilakukan proses jurnal transaksi LO lagi dengan memasukkan tanggal validasi pada menu jurnal LO, apalagi dengan tidak berfungsinya proses jurnal transaksi pendapatan dengan official assessment maka membuat LO yang disajikan tidak dapat diyakini kebenarannya.

4.2.1.1.3.8 Pengujian Neraca Konsolidasi

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator Laporan Neraca Konsolidasi dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan neraca konsolidasi, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah:

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD format laporan neraca konsolidasi.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD struktur laporan neraca konsolidasi.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam laporan neraca konsolidasi.

Tabel 4.27
Hasil Pengujian Neraca Konsolidasi

Keterangan	Format neraca	Struktur neraca	Validitas Jumlah Realisasi(neraca Gabungan)	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	0	2
Kabid. Akuntansi DPKD	1	1	0	2
Total Nilai				4
nilai Maks				6
persentase hasil akhir				66.67%

Sumber: Pengolahan data

Hasil uji neraca konsolidasi dapat dilihat tabel 4.27 bahwa pengolahan data kuisisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak laporan neraca konsolidasi tetapi untuk struktur dan validitas laporannya tidak bisa dihasilkan, dengan nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 4 dari maksimal nilai 6 dengan persentase nilai uji hasil akhir aplikasi laporan neraca konsolidasi sebesar 66,67 %.

4.2.1.1.3.9 Pengujian LPSAL Konsolidasi

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator Laporan Perubahan Saldo Konsolidasi dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan Perubahan Saldo Konsolidasi, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah :

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD format Laporan Perubahan Saldo Konsolidasi.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD struktur Laporan Perubahan Saldo Konsolidasi.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam Laporan Perubahan Saldo Konsolidasi.

Tabel 4.28
Hasil Pengujian LPSAL Konsolidasi

Keterangan	Format LPSAL	Struktur LPSAL	Validitas Jumlah Realisasi(LPSAL Gabungan)	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	0	2
Kabid. Akuntansi DPKD	1	1	0	2
Total Nilai				4
Nilai Maks				6
Persentase hasil akhir				66.67%

Sumber: Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisisioner yang sudah diisi oleh subjek penelitian pada tabel 4.28 di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak Laporan Perubahan Saldo Konsolidasi tetapi struktur dan validitas laporannya tidak bisa dihasilkan, dengan nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 4 dari maksimal nilai 6 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Aplikasi SKPD sebesar 66,67 %.

Observasi menu LPSAL pada modul pertanggungjawaban, menu aplikasi LPSAL tersebut tidak bisa diakses dengan pesan error “Unknown name Lpsal “, ketika peneliti sampaikan kepada Admin SIPKD DPKD informasi yang disampaikan dari Admin SIPKD tersebut adalah menu LPSAL sedang dalam perbaikan dan sampai peneliti menuangkan hasil penelitian menu tersebut belum dapat diakses.

4.2.1.1.3.10 Pengujian Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi

SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah:

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD format Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD struktur Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi.

Tabel 4.29
Hasil Pengujian LPE Konsolidasi

Keterangan	Format LPE	Struktur LPE	Validitas Jumlah Realisasi(LPE Gabungan)	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	0	2
Kabid. Akuntansi DPKD	1	1	0	2
Total Nilai				4
nilai Maks				6
persentase hasil akhir				66.67%

Sumber: Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisioner pada tabel 4.29 yang sudah di isi oleh subjek penelitian di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi tetapi untuk struktur dan validitas laporannya tidak bisa dihasilkan, dengan nilai dari hasil olah data kuisioner adalah 4 dari maximal nilai 6 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Aplikasi Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi SKPD sebesar 66,67 %.

Peneliti melakukan observasi terhadap aplikasi SIPKD menu cetak LPE dan aplikasi SIPKD menyajikan format laporan LPE dengan jumlah realisasi kosong

atau tidak dapat disajikan, ketika dikonfirmasi ke Admin SIPKD keterangan yang disampaikan masih sama dengan kendala sebelumnya yaitu permasalahan pada mapping atau pemetaan rekening, kalau sebelumnya permasalahan pada LO konsolidasi realisasi ditampilkan tapi tidak sesuai dengan LRA konsolidasi maka pada LPE konsolidasi realisasi tidak dapat disajikan.

4.2.1.1.3.11 Pengujian Laporan Arus Kas Konsolidasi

Pengujian hasil akhir aplikasi dengan indikator Laporan Arus Kas Konsolidasi dilakukan dengan menguji fasilitas yang disediakan oleh aplikasi SIPKD terkait salah satu hasil akhir dari aplikasi SIPKD yaitu Laporan Arus Kas Konsolidasi, adapun fitur yang akan dijadikan kriteria pengujian adalah:

- a. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD Buku Besar Kas.
- b. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD Jurnal Kas.
- c. Ada atau tidaknya aplikasi SIPKD menghasilkan validitas realisasi dalam Laporan Arus Kas Konsolidasi.

Tabel 4.30
Hasil Hasil Pengujian LAK konsolidasi

Keterangan	Format LAK	Struktur LAK	Validitas Jumlah Realisasi(LAK Gabungan)	Total nilai
Admin SIPKD	1	1	0	2
Bidang Akuntansi PPKD	1	1	0	2
Total Nilai				4
Nilai Maks				6
Persentase hasil akhir				66.67%

Sumber: Pengolahan data

Pengolahan data kuisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian pada tabel 4.30 di peroleh hasil bahwa SIPKD menyediakan fasilitas untuk cetak

laporan neraca konsolidasi tetapi untuk struktur dan validitas laporannya tidak bisa dihasilkan, dengan nilai dari hasil olah data kuisioner adalah 4 dari maksimal nilai 6 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Aplikasi Laporan Arus Kas Konsolidasi sebesar 66,67 %.

Sama dengan observasi pada menu LPSAL peneliti juga tidak mendapatkan LAK Konsolidasi disajikan oleh realisasinya oleh aplikasi SIPKD sehingga penyajian laporan arus kas Pemda dilakukan dengan proses manual.

4.2.1.1.3.12 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hasil Akhir Aplikasi

Hasil Akhir Aplikasi dalam pengujian Hasil Akhir Aplikasi dapat di ambil kesimpulan bahwa dari rangkaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bisa dihasilkan oleh aplikasi SIPKD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung hanya Laporan Realisasi Anggaran. Hasil Pengujian indikator hasil aplikasi melalui table 4.31 uji kuisioner dengan hasil sebagai berikut :

Tabel.4.31
Rekapitulasi Hasil Pengujian hasil akhir aplikasi

No	Kriteria Pengujian	Tingkat Terbantu	Kriteria Terbantu
1	Pengujian Jenis Laporan Keuangan	16,67%	Sangat tidak terbantu
2	Pengujian LRA SKPD	100,00%	sangat terbantu
3	Pengujian LPSAL SKPD	66,67%	terbantu
4	Pengujian LO SKPD	66,67%	terbantu
5	Pengujian Neraca	66,67%	terbantu
6	Pengujian LPE SKPD	66,67%	terbantu
7	Pengujian LRA Konsolidasi	100,00%	sangat terbantu
8	Pengujian LPSAL Konsolidasi	66,67%	terbantu
9	Pengujian LO Konsolidasi	66,67%	terbantu
10	Pengujian Neraca Konsolidasi	66,67%	terbantu
11	Pengujian LAK Konsolidasi	66,67%	terbantu
12	Pengujian LPE konsolidasi	66,67%	terbantu
	Hasil akhir nilai rata - rata pengujian	68,06%	terbantu

Sumber: Pengolahan data

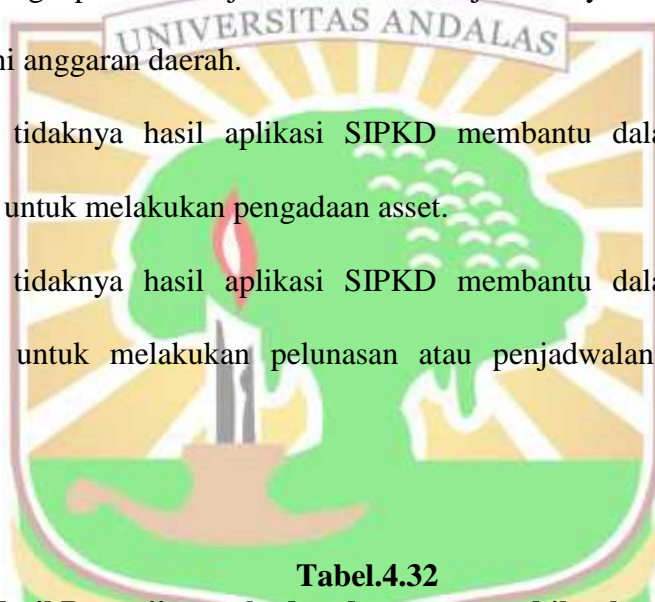
Dalam pengujian SIPKD untuk menu pelaporan peneliti hanya menemukan format laporan yang tersedia, hanya Laporan Realisasi Anggaran yang masih bisa dipertanggung jawabkan dari segi validitas realisasi dan format laporan, untuk LKPD selain Laporan Realisasi Anggaran hanya muncul cetakan format laporan tanpa ada realisasi transaksi hasil pengolahan aplikasi.

4.2.1.2 Pengujian Relevan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Kabupaten Sijunjung.

Dalam dimensi penelitian Relevan, indikator yang dipakai adalah hasil aplikasi SIPKD terutama LKPD, pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh aplikasi SIPKD bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan, sehingga bisa disimpulkan apakah implementasi aplikasi SIPKD di Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat dipertanggung jawabkan secara kualitas hasil akhir aplikasi untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Adapun kriteria kuisisioner yang peneliti siapkan adalah sebagai berikut :

- a. Ada atau tidaknya hasil aplikasi SIPKD membantu dalam menentukan keputusan dalam Mengalokasikan anggaran berikutnya
- b. Ada atau tidaknya hasil aplikasi SIPKD membantu dalam menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
- c. Ada atau tidaknya hasil aplikasi SIPKD membantu dalam menilai penyertaan modal BUMD.
- d. Ada atau tidaknya hasil aplikasi SIPKD membantu dalam menilai kualitas persediaan masih dapat digunakan untuk operasional instansi dalam jangka pendek.

- e. Ada atau tidaknya hasil aplikasi SIPKD membantu dalam menilai kualitas persediaan masih dapat digunakan untuk operasional instansi dalam menentukan keputusan untuk melakukan optimalisasi dalam bentuk investasi jangka pendek atas saldo kas (seperti deposito).
- f. Ada atau tidaknya hasil aplikasi SIPKD membantu dalam menentukan keputusan untuk melakukan belanja pemeliharaan aset, rehabilitasi aset atau bahkan menghapuskan/menjual aset tersebut jika ternyata aset tetap justru membebani anggaran daerah.
- g. Ada atau tidaknya hasil aplikasi SIPKD membantu dalam menentukan keputusan untuk melakukan pengadaan aset.
- h. Ada atau tidaknya hasil aplikasi SIPKD membantu dalam menentukan keputusan untuk melakukan pelunasan atau penjadwalan hutang jangka panjang.



Tabel.4.32
Hasil Pengujian terhadap dasar pengambilan keputusan

Keterangan	Kabid Akuntansi	Kabid Pendapatan	PPK-SKPD	Total Nilai
Keputusan dalam Mengalokasikan anggaran berikutnya	0	0	1	
Keputusan dalam menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi	0	0	0	
Keputusan penyertaan modal pada BUMD	0	0	0	

Keterangan	Kabid Akuntansi	Kabid Pendapatan	PPK-SKPD	Total Nilai
Keputusan terhadap kualitas persediaan masih dapat digunakan untuk operasional instansi dalam jangka pendek	0	0	0	
piutang daerah dapat ditagih dalam jangka pendek	0	0	0	
Keputusan untuk melakukan optimalisasi dalam bentuk investasi jangka pendek atas saldo kas (seperti deposito)	0	0	0	
Keputusan untuk melakukan belanja pemeliharaan aset, rehabilitasi aset atau bahkan menghapuskan/menjual aset tersebut jika ternyata aset tetap justru membebani anggaran daerah	0	0	0	
Keputusan untuk melakukan pengadaan aset	0	0	0	
Keputusan untuk melakukan pelunasan atau penjadwalan hutang jangka panjang	0	0	0	
Total nilai	0	0	1	1
Nilai Maks				27
persentase relevan				3.70%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian pada tabel 4.32 di peroleh hasil bahwa dengan tidak maksimalnya LKPD yang dihasilkan oleh SIPKD maka hasil dari SIPKD tidak relevan dalam membantu pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Adapun nilai dari hasil olah data kuisioner adalah 1 dari maksimal nilai 27 dengan persentase nilai uji dimensi relevan sebesar 3,70 %.

Dengan hasil observasi yang sudah peneliti laksanakan dengan mencoba menu – menu aplikasi SIPKD Kabupaten Sijunjung yang masih banyak terdapat

kendala dan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya maka dapat dipastikan bahwa LKPD tidak dapat dihasilkan dengan maksimal sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil yang disajikan SIPKD tidak relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

4.2.1.2.1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Terhadap Relevan SIPKD Kabupaten Sijunjung

Hasil akhir aplikasi dalam pengujian terhadap dasar pengambilan keputusan diambil kesimpulan dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sijunjung dengan memakai aplikasi SIPKD belum bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Hasil pertanggungjawaban dari aplikasi SIPKD tidak berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga tidak relevan dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan. Hasil rekapitulasi ini dapat dilihat pada tabel 4.33 dibawah ini:

Tabel 4.33
Rekapitulasi Hasil Pengujian Dasar Pengambilan Keputusan

No	Kriteria Pengujian	Tingkat Terbantu	Kriteria Terbantu
1	Pengujian dasar pengambilan keputusan	3,70%	Sangat Tidak Terbantu
	Rata - rata pengujian	3,70%	Sangat Tidak Terbantu

4.2.1.3 Pengujian Ketepatan Waktu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Kabupaten Sijunjung.

Dalam dimensi penelitian Ketepatan Waktu, indikator yang dipakai adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan LKPD hasil dari aplikasi SIPKD, adapun indikator yang peneliti siapkan adalah sebagai berikut :

4.2.1.3.1 Hasil Ketepatan Waktu Penyajian LKPD SKPD

Pengujian ketepatan waktu penyajian LKPD dengan aplikasi SIPKD di Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggunakan kriteria penguji sebagai berikut:

- a. Kurang atau sama 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Lebih dari 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Tabel. 4.34
Hasil Pengujian ketepatan waktu SKPD

Keterangan	Kurang atau sama 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Lebih dari 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Total nilai
PPK-SKPD A	0	0	0
PPK-SKPD B	0	0	0
Admin SIPKD A	0	0	0
Admin SIPKD B	0	0	0
Total Nilai			0
nilai maks			4
persentase ketepatan waktu			00.00%

Sumber : Pengolahan data

Dari hasil pengolahan data kuisisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian pada tabel 4.34 di peroleh hasil bahwa dengan tidak maksimalnya SIPKD menyajikan LKPD maka SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung menyajikan LKPD selain LRA dengan proses manual merujuk realisasi anggaran yang di sajikan pada LRA hasil SIPKD, sehingga nilai dari hasil olah data kuisisioner adalah 0 dari maksimal nilai 8 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Ketepatan Waktu Penyajian LKPD SKPD 0,00 %.

4.2.1.3.2 Hasil Ketepatan Waktu Penyajian LKPD SKPKD

Pengujian ketepatan waktu penyajian LKPD dengan aplikasi SIPKD di Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggunakan kriteria penguji sebagai berikut:

- a. Kurang atau sama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Lebih dari 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Tabel 4.35
Hasil Pengujian Ketepatan Waktu SKPKD

Keterangan	Kurang atau sama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Lebih dari 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Total nilai
Kabid Akuntansi	0	0	0
Admin SIPKD	0	0	0
Total Nilai			0
Nilai maks			4
Persentase ketepatan waktu			0.00%

Dari hasil pengolahan data kuisioner yang sudah di isi oleh subjek penelitian pada tabel 4.34 di peroleh hasil bahwa dengan tidak maksimalnya SIPKD menyajikan LKPD maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung menyajikan LKPD selain LRA dengan proses manual merujuk realisasi anggaran yang di sajikan pada LRA hasil SIPKD, sehingga nilai dari hasil olah data kuisioner adalah 0 dari maksimal nilai 8 dengan persentase nilai uji Hasil Akhir Ketepatan Waktu Penyajian LKPD SKPKD 0,00 %.

4.1.2.3.3. Rekapitulasi Hasil Pengujian Ketepatan Waktu

Hasil Pengujian Ketepatan waktu dapat diambil kesimpulan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum dapat menyajikan tepat waktu baik di SKPD

maupun SKPKD sehingga LKPD Kabupaten Sijunjung sangat tidak terbantu. Rekapitulasi hasil pengujian ketepatan waktu dapat dilihat pada tabel 4.36 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.36
Rekapitulasi Hasil Pengujian Ketepatan Waktu

No	Kriteria Pengujian	Tingkat Terbantu	Kriteria Terbantu
1	Pengujian Ketepatan waktu SKPD	0,00%	Sangat Tidak Terbantu
2	Pengujian Ketepatan waktu SKPKD	0,00%	Sangat Tidak Terbantu
	Rata - rata pengujian	0,00%	Sangat Tidak Terbantu

4.2.1.4. Rekapitulasi Analisis Penerapan SIPKD Pada Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Setelah melakukan uji kuisioner dengan kriteria - kriteria yang sudah dipersiapkan berpedoman kepada SAPD basis akrual dan di lakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD maka hasil dari olah data kuisioner tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 4.37
Rekapitulasi Analisis Penerapan SIPKD dalam pelaksanaan SAPD berbasis Akrual Kabupaten Sijunjung

No	Objek yang dianalisa	PersentaseTingkat Terbantu	Kriteria terbantunya
1.	Akurat	78,74 %	Terbantu
2.	Relevan	3,70 %	Sangat Tidak Terbantu
3.	Ketepatan Waktu	0,00 %	Sangat Tidak Terbantu
	Rata-rata	27,48 %	Tidak Terbantu

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 4.34 diatas, bahwa dapat dinilai bahwa rata-rata tingkat terbantunya pelaksanaan SAPD berbasis akrual dengan memakai aplikasi SIPKD

sebesar 27,48% dengan kriteria tidak terbantu. Angka ini menunjukkan bahwa untuk keakuratan aplikasi SIPKD terbantu sebesar 78,74%, sedangkan untuk relevannya sangat tidak terbantu yaitu sebesar 3,70% dan ketepatan waktu aplikasi SIPKD sangat tidak terbantu, dengan nilai 35,85% hal ini menunjukkan bahwa aplikasi tidak berjalan dengan baik dalam membantu melaksanakan SAPD berbasis akrual.

Dari metode penelitian yang sudah dilaksanakan di Dinas Pengelola Keuangan Daerah baik sebagai SKPKD maupun SKPD serta penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan dengan pengujian tingkat akurat, relevan dan ketepatan waktu menunjukkan aplikasi SIPKD di Pemerintah Kabupaten Sijunjung tidak siap sepenuhnya untuk dijadikan alat bantu pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, terutama pada modul Penatausahaan dan Pertanggungjawaban yang pada akhirnya terjadi kegagalan pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.2 Kendala – Kendala yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Sijunjung Dalam Penerapan SIPKD berbasis akrual

Setelah melakukan penelitian terhadap SIPKD dengan uji kuisioner yang di isi oleh subjek penelitian dan melakukan observasi langsung terhadap aplikasi SIPKD maka dapat di simpulkan bahwa aplikasi SIPKD berbasis akrual yang di implementasikan di Pemerintah Kabupaten Sijunjung masih dalam kondisi belum siap sehingga menimbulkan dampak negatif bagi pengelolaan keuangan daerah yang sudah dituntut berbasis akrual sesuai Permendagri No. 64 tahun 2013, yang

menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung adapun kendala - kendala yang peneliti temukan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya duplikasi proses kerja dari alur Aplikasi SIPKD yang di implementasikan di Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang disebabkan desain aplikasi SIPKD masih mengikuti pola manual pengelolaan akuntansi keuangan daerah, sangat berbeda dengan prinsip pemakaian aplikasi yang cepat, singkat dan akurat, sehingga memerlukan alokasi pelaksana tugas khusus demi memenuhi standar prosedur SIPKD.
- b. Dengan adanya pola pemetaan bagan akun standar basis akrual terhadap akun penganggaran (APBD) dalam pelaksanaan transaksi keuangan daerah sehingga pemerintah daerah harus menyediakan tim khusus yang benar – benar memahami tentang bagan akun serta transaksi jurnalnya sehingga ketika terjadi proses jurnal tidak ada kesalahan pos rekening dari transaksi tersebut. Dalam hal ini proses manual masih sangat kelihatan seharusnya aplikasi SIPKD sudah mempersiapkan mapping bagan akun standar tersebut secara otomatis mengingat panduan bagan akun tersebut sudah tertuang dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013, sebaiknya input mapping bagan akun dilakukan apabila ada penambahan rekening baru yang tidak ada pada pedoman Bagan Akun Standar.
- c. Belum berjalannya beberapa menu aplikasi secara fungsi dalam pengelolaan aplikasi berbasis akrual seperti menu transaksi pendapatan dengan penetapan maka hasil laporan yang dihasilkan tidak dapat dipercaya sehingga tim pengelolaan keuangan daerah cenderung melaksanakan administrasi

pengelolaan keuangan daerah dengan cara manual tanpa menggunakan aplikasi, yang tentu saja akan memakan waktu dan tenaga yang lebih besar.

- d. Dengan adanya anjuran solusi untuk melaksanakan jurnal manual sebagai antisipasi terhadap menu aplikasi yang tidak berjalan sesuai fungsinya, maka sama saja dengan membuat jurnal manual tanpa aplikasi, sehingga apabila user aplikasi yang melaksanakan jurnal dengan bukti memorial tidak memahami secara mendalam tentang transaksi keuangan beserta perlakuan akuntansinya, maka sudah bisa dipastikan jurnal transaksi tersebut akan salah dan dampaknya lebih kearah kesalahan LKPD.
- e. Dengan kondisi tidak siapnya aplikasi SIPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung menghadapi kendala dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berimbas kepada ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- f. Aplikasi SIPKD dibangun dengan bahasa pemrograman ASP.Net dan MS.SQL Server untuk databasenya, *source code* aplikasi sudah disampaikan juga kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung, namun Admin SIPKD yang ditugaskan pada masing – masing SKPD belum mampu dalam mengatasi kendala teknis yang timbul dalam aplikasi SIPKD, hanya ada satu Admin SIPKD yang bertugas di DPKD yang mempunyai kemampuan dalam mengelola database MS Sql Server 2008 tanpa menguasai pemrograman ASP.Net.

Secara garis besar implementasi SIPKD di Pemerintah Kabupaten Sijunjung sangat membantu dalam proses penyusunan anggaran dan penatausahaan belanja yaitu penerbitan SP2D, sedangkan dalam mengakomodir proses akrual basis sesuai SAPD basis akrual yang berujung terhadap penerbitan LKPD aplikasi SIPKD di Pemerintah Kabupaten Sijunjung masih memerlukan banyak penyesuaian dan perbaikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi SIPKD belum dapat membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan basis akrual sesuai SAPD basis akrual di Kabupaten Sijunjung, karena dari evaluasi keakuratan aplikasi, evaluasi relevan dan ketepatan waktu penyajian LKPD maka hasil akhir yang didapat adalah kategori tidak terbantu.
2. Proses akrual basis belum berjalan sesuai fungsinya dalam aplikasi SIPKD sehingga terkendala dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan LKPD pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung, oleh sebab itu tim pengelola keuangan daerah lebih memilih melaksanakan pengelolaan keuangan dengan manual.

5.2. Saran

Dari hasil evaluasi kuisioner dan observasi penelitian, untuk penerapan aplikasi SIPKD dalam melaksanakan SAPD berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang lebih optimal direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan kajian mendalam terhadap fungsi – fungsi menu aplikasi yang disediakan dalam aplikasi SIPKD bersama pengembang aplikasi tersebut terutama dalam proses pelaksanaan SAPD berbasis akrual, sehingga menu – menu aplikasi yang sudah disediakan bisa berfungsi sesuai dengan

semestinya dan sebisa mungkin jurnal manual ditiadakan untuk transaksi – transaksi yang bersifat umum dan rutin sehingga akan memperkecil kesalahan jurnal transaksi.

2. Perlunya peningkatan kemampuan aplikasi dalam hal integrasi horizontal dengan aplikasi – aplikasi keuangan lainnya seperti aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan , aplikasi gaji, aplikasi BLUD dan aplikasi keuangan lainnya yang hasil olahan aplikasi tersebut akan menjadi kebutuhan data pada SIPKD.
3. SIPKD dikembangkan dengan konsep Sistem Informasi yang tepat sehingga tujuan penggunaan aplikasi sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah yang akurat,cepat dan efektif bisa tercapai.

5.3. Implikasi penelitian

Implikasi penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan untuk membenahi aplikasi SIPKD, agar di masa yang akan datang aplikasi SIPKD tetap dapat menjadi alat bantu pengelolaan keuangan daerah secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan aplikasi SIPKD sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah berbasis SAPD akrual sehingga dapat dihasilkan pengelolaan keuangan yang optimal dan LKPD yang akurat,relevan serta tepat waktu.